ISSN: (p): 2656-0911
(e): 2656-7320

# JURNAL



# MIMBAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Volume 9 Nomor 2

Tingkah Laku dan Organisasi: Analisis Peran Individu dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja
*Sri Nur Islamiah Basri, Usman Noer, Aswiwi Nurul Amalia, Al Muhajrin, M. Nur Ikhsan*

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Tinjauan Literatur
*Ummu Kalsum, Erna Nazila, Zakia Nabila, Muh. Muhajirin, Herianto*

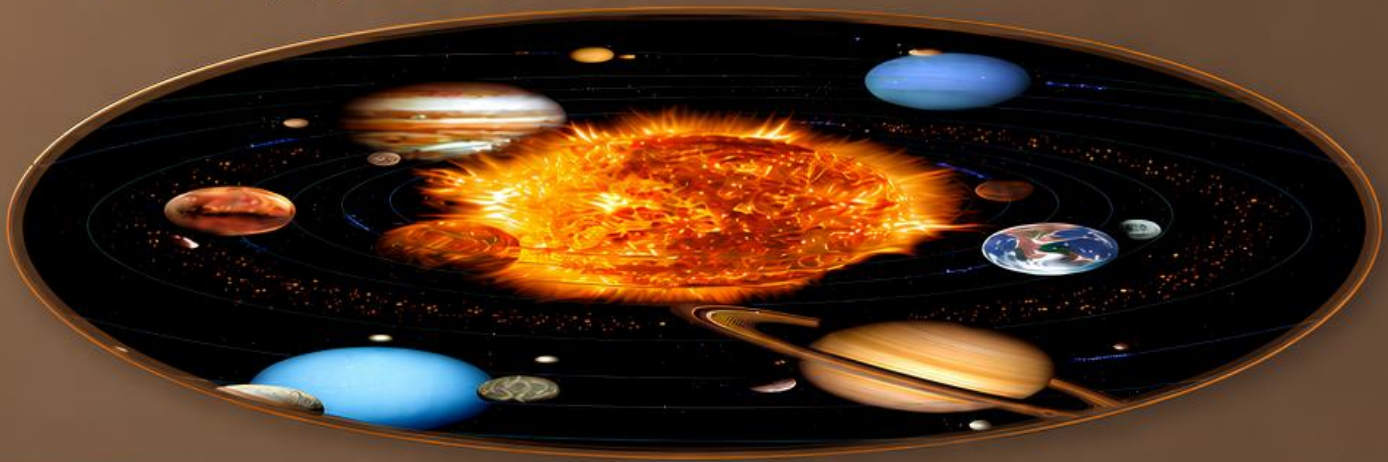
Kerangka HBSE dalam Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia: Ruang Lingkup, Pentingnya Interdisipliner, dan Sintesis dengan Psikologi, Sosiologi, serta Ekologi Sosial
*Zainuddin Muayyad Faiz, Usman Noer, St. Shara Hudzaifah, Miratul Insiyah, Nurul Wahida*

Teori Pendekatan Holistik dalam Perkembangan Anak serta Pengaruh Lingkungan dan Pola Asuh
*Sri Rahmayunita, Usman Noer, Astri Rahmadani, Nurul Hakiki, Nur Inayah Syam, Musdalifa*

Peran Generasi Muda dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Era Globalisasi
*Ummu Kalsum, Sarfika Jumain, Muh. Dhani Budiman, Muh. Rifai*

Lansia Terlupakan: Jebakan Kemiskinan, Kekerasan, dan Isolasi di Masa Tua (Kota Makassar)
*Nur Inaya Syam, Usman Noer, Dwi Putri Septiani, Musdalifah, M. Ishak Saputra*

DILEMA ETIK DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DI UPT DISABILITAS: KETEGANGAN ANTARA KETERBATASAN SUMBER DAYA ORGANISASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KLIEN
*Sadira Sinta Agistya, Moch. Ilham Noer Sunan*



**JURNAL**

**ISSN (p) : 2655-0911**
**ISSN (p) : 2655-7320**

**MIMBAR**
**KESEJAHTERAAN SOSIAL**
**PENANGGUNG JAWAB**
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar**
**Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM**
**Program Studi Kesejahteraan Sosial**
**UIN Alauddin Makassar**
**PELAKSANA DAN PENYUNTING**
**Prof. Dr. Syamsuddin AB., S.Ag., M.Pd**
**Prof. Dr. H. Muh. Ilham, M.Pd**
**Dr. Syamsidar, S. Ag ., M.Ag**
**Dr. Sadhriany Pertiwi Saleh, M.Si**
**Dr. Usman, S.Ag., M.Ag.**
**PENYELARAS BAHASA**
**Faisal, S.Pd**
**Ariel R. Cahyadi Usman, S.Pd.**
**Ummul Khair**

***Alamat Redaksi***
**Program Studi Kesejahteraan Sosial**
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar**
**Jl. Yasin Limpo No 36 Romang Polong Samata Gowa**

***Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial sebuah inspirasi wadah untuk melahirkan ide inovatif dan menyatakan pendapat dalam bentuk karya tulis, yang terkait dengan profesi pekerja sosial, masalah sosial, pelayanan sosial, ketaganaan, narkotika, panti sosial, kebijakan sosial CSR, disabilitas, keagamaan, dan aplikatif, penguatan keberfungsian individu, kelompok dan organisasi yang dibingkai solusi kesejahteraan sosial.***

***Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Volume 9, Nomor 2 (2026)***

# Tingkah Laku dan Organisasi: Analisis Peran Individu dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja

Sri Nur Islamiah Basri[1], Usman Noer[2], Aswiwi Nurul Amalia[3], Al Muhajrin[4], M. Nur Ikhsan[5]

[1] *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.*

snurislamiahbasri@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id, aswiwinurulamalia@gmail.com, almuhajrin732@gmail.com, mnurikhsan2709@gmail.com

**Abstrak:** Tingkah laku organisasi merupakan kajian yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan organisasi serta pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi. Pemahaman mengenai tingkah laku organisasi menjadi penting karena keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, teknologi, dan modal yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana individu menjalankan perannya serta bagaimana budaya organisasi membentuk pola perilaku kerja anggotanya. Peran individu yang tercermin melalui motivasi, kompetensi, komitmen, dan tanggung jawab kerja menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, budaya organisasi berfungsi sebagai sistem nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam berinteraksi dan melaksanakan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkah laku organisasi melalui peran individu dan budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

Hasil kajian menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi, kompetensi, dan komitmen tinggi cenderung menunjukkan perilaku kerja yang lebih produktif. Selain itu, budaya organisasi yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kerja sama, memperkuat loyalitas anggota organisasi, serta mendorong terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sinergi antara peran individu dan budaya organisasi merupakan faktor penting dalam membentuk tingkah laku organisasi yang positif dan mendukung peningkatan produktivitas kerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola kedua aspek tersebut secara terpadu guna mencapai efektivitas dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang.

***Kata kunci:*** *tingkah laku organisasi; peran individu; budaya organisasi; produktivitas kerja; organisasi.*

# Organizational Behavior: An Analysis of Individual Roles and Organizational Culture in Enhancing Work Productivity

Sri Nur Islamiah Basri[1], Usman Noer[2], Aswiwi Nurul Amalia[3], Al Muhajrin[4], M. Nur Ikhsan[5]

[1] *Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*

snurislamiahbasri@gmail.com , usmannoer@uin-alauddin.ac.id , aswiwinurulamalia@gmail.com , almuhajrin732@gmail.com , mnurikhsan2709@gmail.com

***Abstract:*** *Organizational behavior is the study of individual and group behavior within an organizational environment and its impact on organizational effectiveness. Understanding organizational behavior is crucial, as organizational success is determined not only by possessed resources, technology, and capital, but also by how individuals execute their roles and how organizational culture shapes the work behavior patterns of its members. The individual role—reflected through motivation, competence, commitment, and work responsibility—serves as a vital factor in supporting the achievement of organizational goals. Concurrently, organizational culture functions as a system of values, norms, and beliefs that guides members in interacting and performing their duties. This study aims to analyze organizational behavior through individual roles and organizational culture in enhancing work productivity. Utilizing a descriptive qualitative approach, this study employs a literature review method (library research). Data were gathered from various relevant national scientific articles and analyzed using content analysis techniques.*

*The results of the study indicate that individuals possessing high motivation, competence, and commitment tend to exhibit more productive work behaviors. Furthermore, a strong organizational culture is capable of creating a conducive work environment, enhancing collaboration, strengthening member loyalty, and driving optimal work productivity. The findings also demonstrate that the synergy between individual roles and organizational culture is a critical determinant in fostering positive organizational behavior and supporting sustainable increases in work productivity. Consequently, organizations must manage both aspects in an integrated manner to achieve long-term organizational effectiveness and success.*

***Keywords:*** *organizational behavior; individual roles; organizational culture; work productivity; organization.*

## Pendahuluan

Perilaku dalam organisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kerja tempat individu berada. Setiap individu dalam organisasi senantiasa berinteraksi dengan individu lain, sistem kerja, serta aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Interaksi ini membentuk pola perilaku yang memengaruhi cara individu dalam bekerja, bersikap, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, organisasi tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku organisasi menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif.

Perkembangan organisasi modern yang semakin kompleks menuntut adanya penyesuaian dalam perilaku kerja individu. Perubahan lingkungan eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan persaingan kerja yang semakin ketat turut memengaruhi cara individu dalam menjalankan perannya di organisasi. Kondisi ini menyebabkan perilaku kerja menjadi lebih dinamis dan tidak lagi bersifat statis. Individu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi.[1]

Dalam konteks organisasi, produktivitas kerja menjadi salah satu indikator utama keberhasilan. Produktivitas tidak hanya bergantung pada sumber daya fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Individu yang memiliki motivasi, kompetensi, dan komitmen yang tinggi akan cenderung memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap organisasi. Selain itu, kemampuan organisasi dalam mengelola perilaku kerja karyawan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku memiliki peran sentral dalam pencapaian kinerja organisasi.[2]

Peran individu dalam organisasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan organisasi. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kemampuan, motivasi, dan sikap kerja. Perbedaan tersebut akan memengaruhi cara individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Individu dengan motivasi kerja yang tinggi dan kompetensi yang baik cenderung menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Penelitian menunjukkan bahwa faktor individu seperti motivasi dan sikap kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan.[3]

Selain peran individu, budaya organisasi juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk perilaku kerja. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas kerja. Budaya yang kuat mampu menciptakan keseragaman perilaku, meningkatkan disiplin, serta memperkuat kerja sama antaranggota organisasi. Sebaliknya, budaya yang lemah dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan kerja. Dengan demikian, budaya organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku kerja yang produktif.[4]

Budaya organisasi yang positif terbukti mampu meningkatkan produktivitas kerja secara signifikan. Lingkungan kerja yang didukung oleh budaya organisasi yang kuat akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, harmonis, dan kolaboratif. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang baik juga mampu membentuk etos kerja yang tinggi dan disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu, budaya organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.[5]

Hubungan antara peran individu dan budaya organisasi menunjukkan adanya keterkaitan yang saling memengaruhi dalam membentuk perilaku organisasi. Individu yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih optimal jika berada dalam lingkungan budaya organisasi yang mendukung. Sebaliknya, budaya organisasi yang kuat akan lebih efektif jika didukung oleh individu yang memiliki motivasi dan komitmen tinggi. Kedua aspek ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku kerja dalam organisasi. Dengan demikian, sinergi antara individu dan budaya organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara individu, budaya organisasi, dan produktivitas kerja, masih terdapat keterbatasan dalam melihat keterkaitan ketiga variabel secara terpadu. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada hubungan parsial sehingga belum menggambarkan interaksi secara menyeluruh. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan peran individu dan budaya organisasi dalam satu analisis masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan tersebut secara lebih utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkah laku organisasi melalui peran individu dan budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara faktor individu dan budaya organisasi dalam membentuk perilaku kerja yang efektif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa sinergi antara peran individu dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja.

## Metode

Metode enelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai konsep yang berkaitan dengan organisasi, perilaku individu, budaya organisasi, serta produktivitas kerja berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara struktur organisasi, karakteristik individu, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja dalam konteks perilaku organisasi. Sumber data penelitian berasal dari berbagai artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas produktivitas kerja, budaya organisasi, struktur organisasi, karakteristik individu, kompetensi, motivasi kerja, komitmen organisasi, serta lingkungan kerja.[6]

Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian tema penelitian, kredibilitas sumber, relevansi substansi, serta kebaruan publikasi ilmiah. Literatur yang digunakan merupakan artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi topik penelitian, penelusuran literatur, seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi, pengelompokan data, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi dan produktivitas kerja.

Bahan penelitian berupa dokumen tertulis yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengidentifikasi, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber literatur yang telah dipilih. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu struktur organisasi, perilaku individu dalam organisasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, kompetensi, motivasi, serta produktivitas kerja. Pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi temuan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengorganisasikan, serta menginterpretasikan berbagai data yang diperoleh dari sumber literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, tema, dan hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam berbagai literatur.[7] Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara struktur organisasi, karakteristik individu, budaya organisasi, dan produktivitas kerja. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda serta melakukan peninjauan ulang terhadap hasil analisis guna memastikan konsistensi, objektivitas, dan keakuratan temuan penelitian.

*Table 1. Literatur Utama Penelitian*

| No. | Nama | Judul Penelitian | Tahun | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D. H. Wicaksono & J. A. Tu | Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan | 2024 | Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan |
| 2. | L. Hidayat, H. Sulistyo, & D. Erlita | Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Dinas Pembekalan TNI AL | 2022 | Jurnal Wawasan Manajemen |
| 3. | D. W. Retnaningtyas & S. Widodo | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Jakarta | 2022 | Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen |
| 4. | M. Junaidi, dkk. | Peran Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja dalam Optimalisasi Produktivitas Kerja | 2025 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis |
| 5. | N. Tanti & I. R. Situmorang | Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan | 2023 | Journal of Information Systems and Management |
| 6. | Adi Kurnia | Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya | 2020 | Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi |
| 7. | Rizki Lala Amelia & Suparto | Komponen Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Karyawan | 2025 | Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies |
| 8. | Melati Septiani | Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan | 2025 | Character: Jurnal Penelitian Psikologi |
| 9. | Devi Alhayatun Nufuz, dkk. | Strategi Efektif dalam Manajemen Perubahan: Membangun Ketahanan Organisasi di Era Digital | 2025 | Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara |
| 10. | T. H. Afriliyani | Peran Karakteristik Individu pada Peningkatan Kinerja Karyawan | 2025 | Journal of Business Economics and Management |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Emha Zainul Mukminin, dkk. | P engaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Kerja Karyawan | 2025 | Resilience: Journal of Psychology |
| 12. | Rizal Nabawi | Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai | 2019 | Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen |
| 13. | Ishiqa Ramadhany Putri & Ningrum Fauziah Yusuf | Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi | 2022 | Jurnal Administrasi Publik |
| 14. | Muhammad Ras Muis, J. Jufrizen, & Muhammad Fahmi | Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan | 2018 | Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) |
| 15. | Anita Yolanda | Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada UTNDM | 2024 | Jurnal Manajemen dan Bisnis |

## Hasil dan Pembahasan

### Organisasi dan Strukturnya dalam Lingkungan Sosial

Organisasi merupakan sistem sosial yang terbentuk dari interaksi antarindividu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sosial, organisasi tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang membentuk pola hubungan kerja yang lebih kompleks dan dinamis. Setiap individu di dalam organisasi berperan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan melalui sistem pembagian kerja. Struktur organisasi menjadi elemen penting karena mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar aktivitas berjalan lebih terarah dan efisien. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.[8] Hal ini menegaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem struktur yang jelas. Dengan demikian, struktur menjadi dasar utama dalam keberlangsungan organisasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas mampu menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan pekerjaan di berbagai level organisasi. Pembagian tugas yang sistematis membuat setiap individu memahami perannya secara spesifik dan tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ini meningkatkan efisiensi kerja karena setiap bagian memiliki fokus tugas yang berbeda dan terarah. Selain itu, struktur yang jelas mempercepat pencapaian

tujuan organisasi karena alur kerja lebih mudah dikendalikan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja.[9] Struktur juga membantu mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, keteraturan kerja sangat bergantung pada struktur organisasi.

Struktur organisasi juga memengaruhi alur komunikasi dalam organisasi secara signifikan. Komunikasi yang mengikuti jalur struktural membuat informasi lebih jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antaranggota organisasi. Hal ini penting dalam menjaga kualitas koordinasi antarbagian agar tetap berjalan efektif. Selain itu, alur komunikasi yang baik membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Struktur organisasi juga berkaitan dengan efektivitas hubungan kerja antarindividu dalam organisasi.[10] Kepemimpinan dalam struktur turut memperkuat arah komunikasi yang terjadi. Dengan demikian, komunikasi menjadi elemen penting dalam efektivitas struktur organisasi.

Lingkungan sosial yang terus berubah turut memengaruhi struktur organisasi dalam menjalankan fungsinya. Perubahan teknologi dan dinamika masyarakat menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan struktur akan mengalami penurunan efektivitas kerja secara bertahap. Oleh karena itu, fleksibilitas struktur menjadi kebutuhan penting dalam organisasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan lingkungan.[11] Adaptasi struktur menjadi bagian dari strategi organisasi dalam menghadapi perubahan. Dengan demikian, organisasi harus selalu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada.

Struktur organisasi juga berpengaruh terhadap perilaku individu di dalamnya secara langsung. Kejelasan struktur membantu individu memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam organisasi. Hal ini mengurangi kebingungan peran yang sering terjadi dalam organisasi yang tidak memiliki struktur jelas. Individu dapat bekerja lebih fokus karena mengetahui batasan tugasnya masing-masing. Struktur juga menciptakan disiplin kerja yang lebih kuat dalam organisasi. Ketika struktur tidak jelas, kinerja individu cenderung menurun secara signifikan. Oleh karena itu, struktur berperan penting dalam membentuk perilaku kerja.

Struktur organisasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pengarah pola kerja dalam organisasi. Struktur yang baik mampu menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan tugas di setiap level organisasi. Hal ini membantu menciptakan sistem kerja yang lebih stabil dan teratur. Selain itu, struktur memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Organisasi menjadi lebih mudah dikendalikan ketika struktur berjalan dengan baik. Dengan demikian, struktur memiliki fungsi normatif dan operasional sekaligus.

Jika dianalisis lebih dalam, struktur organisasi menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Keseimbangan ini diperlukan agar tidak terjadi penumpukan beban kerja pada satu pihak tertentu. Struktur yang seimbang menciptakan pembagian kerja yang lebih adil dan proporsional. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Organisasi dapat memaksimalkan sumber daya manusia dengan lebih baik. Dengan demikian, struktur berfungsi sebagai pengatur sistem kerja yang efektif.

Secara keseluruhan, organisasi dan strukturnya dalam lingkungan sosial menunjukkan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh kejelasan struktur, kemampuan adaptasi, serta kualitas koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan.[12] Struktur tidak hanya menjadi kerangka formal, tetapi juga pengarah utama dalam sistem kerja organisasi. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana struktur diterapkan secara konsisten dalam praktik kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi menjadi fondasi utama dalam sistem sosial organisasi.

**Peran Individu dalam Organisasi dan Perilaku Kerja**

Peran individu dalam organisa si merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda seperti motivasi, kompetensi, pengalaman, dan komitmen kerja yang membentuk pola perilaku kerja. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan variasi dalam cara individu menjalankan tugasnya dalam organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas kinerja individu. Tanpa motivasi yang baik, kinerja organisasi akan sulit mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, motivasi menjadi dasar penting dalam perilaku kerja.

Hasil temuan menunjukkan bahwa individu dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka memiliki dorongan internal yang kuat untuk mencapai hasil kerja yang maksimal tanpa harus selalu diawasi secara ketat. Sebaliknya, individu dengan motivasi rendah cenderung bekerja secara minimal dan kurang memiliki inisiatif dalam bekerja. Perbedaan motivasi ini berdampak langsung terhadap kualitas hasil kerja dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Motivasi juga menentukan tingkat keterlibatan individu dalam organisasi. Dengan demikian, motivasi menjadi elemen penting dalam perilaku kerja.

Selain motivasi, kompetensi individu juga berperan penting dalam menentukan efektivitas kerja dalam organisasi. Individu yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan akan lebih mudah menyelesaikan tugas secara efisien dan tepat waktu. Kompetensi juga membantu individu dalam menghadapi permasalahan kerja yang bersifat kompleks dan membutuhkan analisis yang baik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.[13] Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan penting dalam organisasi. Kompetensi juga menentukan kualitas hasil kerja individu. Oleh karena itu, kompetensi menjadi faktor penting dalam sistem kerja.

Lingkungan kerja juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu dalam organisasi. Lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif dapat meningkatkan semangat kerja serta konsentrasi individu dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan tekanan psikologis bagi individu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal sangat memengaruhi kinerja kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.[14] Lingkungan kerja menjadi faktor pendukung utama dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus menciptakan lingkungan yang baik.

Komitmen organisasi juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku kerja individu. Individu yang memiliki komitmen tinggi menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan keterikatan emosional terhadap organisasi. Mereka tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi juga karena rasa memiliki terhadap organisasi. Komitmen yang kuat membantu menjaga stabilitas organisasi dalam jangka panjang. Hal ini juga mengurangi tingkat keluar masuk pegawai dalam organisasi. Komitmen memperkuat hubungan antara individu dan organisasi. Dengan demikian, komitmen menjadi elemen penting dalam perilaku kerja.

Perilaku kerja individu merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Motivasi, kompetensi, lingkungan kerja, dan komitmen bekerja secara simultan dalam memengaruhi kinerja individu. Setiap faktor memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk kualitas kerja. Organisasi yang mampu mengelola faktor-faktor ini akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Semua faktor harus diperhatikan secara seimbang. Dengan demikian, perilaku kerja bersifat kompleks dan multidimensional.

Selain itu, interaksi sosial dalam organisasi juga memengaruhi perilaku individu dalam bekerja. Individu tidak bekerja secara terpisah, tetapi selalu berada dalam hubungan sosial yang saling memengaruhi. Hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan. Sebaliknya, konflik dalam hubungan kerja dapat menurunkan kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial sangat penting dalam organisasi. Interaksi sosial menjadi bagian dari sistem kerja. Oleh karena itu, hubungan antarindividu harus dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, peran individu sangat menentukan keberhasilan organisasi karena individu menjadi pelaksana utama dalam sistem kerja. Kualitas organisasi sangat bergantung pada kualitas individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pengembangan individu menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

**Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas**

Budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini menjadi pedoman tidak tertulis yang mengarahkan perilaku individu dalam bekerja dan berinteraksi dalam organisasi. Setiap anggota organisasi mengikuti nilai yang telah terbentuk dalam lingkungan kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.[15] Hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kerja organisasi. Budaya juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, budaya sangat penting dalam organisasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan teratur. Individu lebih mudah memahami aturan yang berlaku sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten tanpa banyak arahan tambahan. Kondisi ini meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi secara keseluruhan. Budaya yang kuat juga menciptakan standar kerja yang sama di antara anggota organisasi. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Budaya menjadi pengarah perilaku kerja. Dengan demikian, budaya sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

Budaya organisasi juga memperkuat hubungan sosial antaranggota organisasi melalui nilai kebersamaan dan kerja sama. Nilai ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan mengurangi potensi konflik internal dalam organisasi. Kesamaan nilai dan tujuan membuat anggota organisasi lebih mudah bekerja sama dalam mencapai target bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memperkuat hubungan kerja dan stabilitas organisasi.[16] Hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki fungsi sosial yang penting. Hubungan kerja menjadi lebih solid. Oleh karena itu, budaya memperkuat kohesi organisasi.

Budaya organisasi terbentuk melalui proses pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan kerja. Individu secara tidak sadar menyesuaikan perilakunya dengan nilai yang berlaku dalam organisasi. Proses ini menjadikan budaya sebagai bagian yang melekat dalam sistem kerja. Budaya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini membuat budaya sulit dipisahkan dari organisasi. Budaya menjadi bagian dari identitas kerja. Dengan demikian, budaya terbentuk secara sosial.

Jika budaya organisasi lemah, maka akan muncul ketidakteraturan dalam perilaku kerja individu. Individu cenderung bekerja tanpa pedoman yang jelas sehingga hasil kerja menjadi tidak konsisten. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya sangat menentukan kualitas kinerja organisasi. Budaya yang lemah juga meningkatkan risiko konflik kerja. Oleh karena itu, budaya harus diperkuat. Budaya menjadi pengendali perilaku kerja.

Budaya organisasi juga membentuk identitas organisasi yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Identitas ini menciptakan rasa memiliki di antara anggota organisasi sehingga mereka memiliki keterikatan emosional terhadap organisasi. Keterikatan ini mendorong peningkatan loyalitas dan komitmen kerja. Budaya juga menjadi dasar pembentukan karakter organisasi secara keseluruhan. Hal ini memperkuat keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Identitas organisasi menjadi lebih kuat. Dengan demikian, budaya memiliki fungsi identitas.[17]

Dalam jangka panjang, budaya organisasi berperan dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Budaya yang kuat menciptakan pola kerja yang stabil dan konsisten. Hal ini membantu organisasi menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Anggota organisasi memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya juga membantu menjaga keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Kondisi tersebut mendukung terciptanya kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, budaya organisasi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi.

Selain menjaga keberlanjutan organisasi, budaya organisasi juga membentuk identitas organisasi. Identitas tersebut menjadi ciri khas yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Nilai-nilai yang dianut bersama akan tercermin dalam perilaku anggota organisasi. Budaya memengaruhi cara anggota bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Budaya yang positif dapat menumbuhkan sikap profesional dan tanggung jawab. Anggota organisasi juga akan memiliki rasa memiliki yang lebih kuat terhadap organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi dapat memperkuat komitmen dan loyalitas anggota.

Secara keseluruhan, budaya organisasi berperan dalam membentuk perilaku kerja anggota organisasi. Budaya juga membantu memperkuat koordinasi dan kerja sama antaranggota. Nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Budaya yang positif mampu meningkatkan motivasi dan

produktivitas kerja. Sebaliknya, budaya yang lemah dapat menghambat efektivitas organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan budaya yang kuat, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkah laku organisasi melalui peran individu dan budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan organisasi. Struktur organisasi yang jelas mampu menciptakan keteraturan kerja, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, perilaku organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan aturan formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola struktur, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja secara terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran individu memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku kerja dan produktivitas organisasi. Individu yang memiliki motivasi tinggi, kompetensi yang memadai, komitmen yang kuat, serta kemampuan beradaptasi yang baik cenderung menunjukkan kinerja yang lebih optimal dibandingkan individu yang memiliki tingkat motivasi dan kompetensi yang rendah. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam memengaruhi perilaku kerja. Selain itu, hubungan sosial yang positif antaranggota organisasi turut mendukung terciptanya kerja sama yang efektif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pengembangan kualitas individu menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku kerja dan meningkatkan produktivitas organisasi secara berkelanjutan. Budaya organisasi yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memperkuat kerja sama, meningkatkan loyalitas anggota organisasi, serta membentuk pola kerja yang lebih disiplin dan konsisten.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sinergi antara peran individu dan budaya organisasi merupakan faktor utama dalam menciptakan tingkah laku organisasi yang positif. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna menguji hubungan antara peran individu, budaya organisasi, dan produktivitas kerja pada berbagai jenis organisasi serta mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika perilaku organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang semakin kompleks.

## Daftar Pustaka


Afriliyani, T. H. "Peran Karakteristik Individu Pada Peningkatan Kinerja Karyawan." *Journal of Business Economics and Management*, Vol. 1, No. 4 (2025).

Amelia, Rizki Lala, dan Suparto. "Komponen Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Karyawan." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 3 (2025).

Hidayat, L., H. Sulistyo, dan D. Erlita. "Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Dinas Pembekalan TNI AL." *Jurnal Wawasan Manajemen*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Junaidi, M., dkk. "Peran Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja dalam Optimalisasi Produktivitas Kerja." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2025).

Kurnia, Adi. "Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Keefektifan Organisasi di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 2 (2020).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

Muis, Muhammad Ras, J. Jufrizen, dan Muhammad Fahmi. "Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Mukminin, Emha Zainul, dkk. "Pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Kerja Karyawan." *Resilience: Journal of Psychology*, Vol. 1, No. 2 (2025).

Nabawi, Rizal. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2019).

Nufuz, Devi Alhayatun, dkk. “Strategi Efektif dalam Manajemen Perubahan: Membangun Ketahanan Organisasi di Era Digital.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 6 (2025).

Putri, Ishiqa Ramadhany, dan Ningrum Fauziah Yusuf. “Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1 (2022).

Retnaningtyas, D. W., dan S. Widodo. “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Jakarta.” *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2022).

Septiani, Melati. “Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan.” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No. 02 (2025).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2022).

Tanti, N., dan I. R. Situmorang. “Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan.” *Journal of Information Systems and Management*, Vol. 2, No. 4 (2023).

Wicaksono, D. H., dan J. A. Turangan. “Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.” *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 4 (2024).

Yolanda, Anita. “Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3 (2024).

## Endnote

1. D H Wicaksono and J A Turangan, “Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan,” Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 4 (2024), h. 920–927.

2. L Hidayat, H Sulistyo, and D Erlita, “Pengaruh Kompetensi Dan Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Dinas Pembekalan TNI AL,” Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 10, No. 1 (2022), h. 35–44.

3. D W Retnaningtyas and S Widodo, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Jasa Marga (Peresero) TBK Jakarta,” Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen, Vol. 2, No. 2 (2022), 107–118.

4. M Junaidi et al., “Peran Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Dalam Optimalisasi Produktivitas Kerja,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 4, No. 2 (2025), h. 12–23.

5. N Tanti and I R Situmorang, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan,” Journal of Information Systems and Management, Vol. 2, No. 4 (2023), h. 25–33.

6. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 3.

7. Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

8. Adi Kurnia, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Keefektifan Organisasi. Di Sekretariat Daerah ( Setda ) Kabupaten Tasikmalaya,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 10, No. 2 (2020), h., 29–37.

9. Rizki Lala Amelia dan Suparto, “Komponen Pembentukan Struktur Organisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Karyawan,” Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 3 (2025), h. 145–54.

10. Melati Septiani, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan,” Character : Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 12, No. 02 (2025), h. 625–35.

11. Devi Alhayatun Nufuz, dkk., “Strategi Efektif Dalam Manajemen Perubahan: Membangun Ketahanan Organisasi Di Era Digital,” Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 6 (2025), h. 540–47.

12. T. H Afriliyani, “Peran Karakteristik Individu Pada Peningkatan Kinerja Karyawan,” Journal of Business Economics and Management, Vol. 1, No. 4 (2025), h. 1095–1098.

13. Emha Zainul Mukminin, dkk., “Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan,” Resilience: Journal Of Psychology, Vol. 1, No. 2 (2025, h. 46–54.

14. Rizal Nabawi, “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai,” Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Vol. 2, No. 2 (2019), h. 170–183.

15. Ishiqa Ramadhany Putri and Ningrum Fauziah Yusuf, “Pengaruh Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 18, No. 1 (2022), h. 143–154.

16. Muhammad Ras Muis, J Jufrizen, and Muhammad Fahmi, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan,” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), Vol. 1, No. 1 (2018), h. 9–25.

17. Anita Yolanda, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 2, No. 3 (2024), h. 97–111.

# Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Tinjauan Literatur

Ummu Kalsum[1*], Erna Nazila[2], Zakia Nabila[3],
Muh. Muhajirin[4], Herianto[5]
[1] *Program Studi Kesejahteraan Sosial, Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar,Indonesia.*
ummukalsum384@gmail.com

**Abstrak:** Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Namun, berbagai permasalahan seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Lembaga perlindungan anak hadir sebagai respons atas kondisi tersebut, dengan mandat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak sesuai dengan amanat undang-undang dan konvensi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan intervensi yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur, di mana sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan dan terpercaya. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji.

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui program pendampingan, rehabilitasi, advokasi, dan pemberdayaan keluarga. Keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor kunci keberhasilan program. Namun, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kesenjangan implementasi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Lembaga perlindungan anak berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan anak apabila didukung oleh regulasi yang kuat, sumber daya memadai, dan sinergi lintas sektor. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas program secara empiris di berbagai daerah guna menghasilkan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

***Kata kunci:*** *lembaga perlindungan anak; kesejahteraan anak; hak anak; program perlindungan anak; tinjauan literatur*

# The Role of Child Protection Agencies in Improving Child Welfare: A Literature Review

Ummu Kalsum[1*], Erna Nazila[2], Zakia Nabila[3],
Muh. Muhajirin[4], Herianto[5]
[1] *Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*
ummukalsum384@gmail.com

***Abstract:*** *Background: Provides the context or underlying rationale for the study, including the social problem or phenomenon being investigated. Objective: Identifies and explains the primary purpose and main objective of the research. Methods: Briefly explains the main methods used in the study, including the approach, research design, subjects/samples, and data analysis techniques. Results: Presents a summary of the main research findings, including key data, trends, or identified patterns. Conclusion: Contains the conclusions drawn from the research findings, including the implications of the findings and suggestions for future research or practical Child welfare is a critical indicator of a nation's human resource development. However, various issues such as violence, exploitation, neglect, and discrimination against children remain serious challenges in Indonesia. Child protection agencies exist as a response to these conditions, carrying the mandate to ensure the fulfillment of children's basic rights in accordance with national laws and international conventions. This study aims to examine the role of child protection agencies in improving child welfare through various implemented programs and interventions, as well as to identify the supporting and hindering factors in their execution.*

*This study utilizes a qualitative approach with a literature review method, where data sources were obtained from relevant and credible scientific journal articles, institutional reports, regulations, and policy documents. The analysis was conducted descriptively by identifying the main themes emerging from the various reviewed literature sources.*

*The results of the literature review indicate that child protection agencies play a significant role in improving child welfare through counseling and assistance programs, rehabilitation, advocacy, and family empowerment. The active involvement of the government, community, and private sector serves as a key factor for program success. However, limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and gaps in policy implementation remain the primary obstacles. Child protection agencies make a tangible contribution to realizing child welfare when supported by strong regulations, adequate resources, and cross-sector synergy. Further research is recommended to empirically examine program effectiveness across various regions to generate more comprehensive and sustainable child protection policies.*

***Keywords:*** *child protection agencies; child welfare; children's rights; child protection programs; literature review.*

## Pendahuluan

Bagian Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Indonesia tercatat memiliki sekitar 80 juta anak atau sepertiga dari total populasi penduduknya, sehingga persoalan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak anak masih terus terjadi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Agustus 2023, tercatat 2.335 kasus kekerasan anak di Indonesia, dengan 487 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi, dan 401 kasus perdagangan manusia sepanjang tahun 2023, dengan total korban anak mencapai 19.017 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. (Ayu et al., 2024)

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Di sisi lain, jumlah anak yatim piatu dan terlantar yang terus meningkat mendorong kebutuhan mendesak akan lembaga sosial yang bertanggung jawab memberikan kesejahteraan sosial sebagai pengganti fungsi keluarga bagi anak-anak yang membutuhkan perlindung. (Prastini, 2024)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari perlindungan anak, di antaranya terkait pendampingan sosial berbasis keadilan restoratif, rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, serta standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah dirancang sebagai pedoman untuk memastikan

setiap anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga mendapatkan perlindungan sesuai hak-hak mereka, mencakup penghormatan terhadap martabat anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, meliputi kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan, dan terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung bersifat parsial dan terfokus pada satu jenis program atau lembaga tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi lembaga perlindungan anak secara umum terhadap kesejahteraan anak.( Di et al., 2025)

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui tinjauan literatur. Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan lintas sektor secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa peta konseptual yang lebih komprehensif tentang peran dan tantangan lembaga perlindungan anak, sekaligus menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program perlindungan anak yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Tinjauan literatur sistematis memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang tersedia.

Subjek penelitian dalam tinjauan literatur ini adalah dokumen-dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta buku referensi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Sumber-sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu antara tahun 2015 hingga 2025, guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data yang dikaji.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Tahap kedua adalah skrining, yaitu hasil pencarian disaring berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah kelayakan (*eligibility*), yaitu dokumen yang lolos skrining dievaluasi secara lebih mendalam berdasarkan isi dan kualitasnya. Tahap keempat adalah inklusi, yaitu dokumen yang memenuhi seluruh kriteria ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar ekstraksi data yang memuat informasi mengenai identitas sumber (penulis, tahun, judul, dan nama jurnal), tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta kesimpulan utama dari setiap sumber. Lembar ekstraksi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan konsistensi dan keteraturan dalam proses pengumpulan dan pencatatan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci pencarian seperti *"lembaga perlindungan anak"*, *"kesejahteraan anak"*, *"program perlindungan anak"*, *"hak anak"*, dan *"child welfare"*. Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) dokumen diterbitkan antara tahun 2015–2025; (2) membahas topik perlindungan anak dan kesejahteraan anak; (3) diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau lembaga resmi; dan (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dokumen yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif, di mana setiap temuan dari literatur dikaji secara kritis untuk kemudian disintesis menjadi sebuah narasi yang koheren dan menjawab tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, ditemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia. Temuan-temuan tersebut dianalisis secara tematik dan disajikan dalam lima sub-pembahasan berikut, yang secara keseluruhan menjawab tujuan penelitian serta mendukung argumen bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak sangat bergantung pada kekuatan regulasi, kecukupan sumber daya, dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan:

### Kerangka Hukum dan Kelembagaan Perlindungan Anak di Indonesia

Kerangka hukum merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas perlindungan anak di suatu negara. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dua instrumen hukum utama yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Regulasi tersebut terus diperkuat seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi anak. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengintegrasikan prinsip perlindungan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan implementasinya melibatkan banyak institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, hingga sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.(No et al., 2024)

Selain regulasi, struktur kelembagaan yang menjalankan fungsi perlindungan anak di Indonesia juga terbilang cukup beragam dan melibatkan banyak aktor. KPAI melaksanakan agenda strategis pengawasan yang mencakup kualitas pengasuhan, penekanan angka kekerasan termasuk eksploitasi, pencegahan dan penanganan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak melalui struktur kelembagaan yang bergerak dalam Divisi Pengawasan, Divisi Pengaduan, Divisi Mediasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, serta Divisi Kemitraan. Di samping KPAI, lembaga-lembaga non-pemerintah turut berperan aktif dalam ekosistem perlindungan anak. Lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya

perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat, meskipun tantangan yang dihadapi tetap besar, termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya laporan kasus kekerasan, dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil.(Yandy et al., 2024)

Persoalan efektivitas regulasi juga menjadi catatan penting dalam kajian ini. Meskipun regulasi telah tersedia, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, penelantaran, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum optimal pada tahap implementasi. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara produksi regulasi dan implementasi nyata di lapangan. Perlunya penguatan mekanisme implementasi, bukan hanya penguatan substansi hukum, menjadi salah satu rekomendasi yang berulang kali muncul dalam berbagai kajian. Implementasi rehabilitasi sering terhambat oleh keterbatasan layanan yang tersebar, terutama di daerah, stigma sosial, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan, sementara mekanisme pemberian ganti rugi mengalami kendala seperti prosedur administrasi yang rumit, ketidakmampuan pelaku untuk membayar, serta lamanya proses hukum. (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Tabel 1. berikut merangkum beberapa instrumen hukum utama yang menjadi landasan kelembagaan perlindungan anak di Indonesia.

| No | Instrumen Hukum | Tahun | Pokok Pengaturan |
|---|---|---|---|
| 1 | UU No. 23 Tahun 2002 | 2002 | Perlindungan Anak |
| 2 | UU No. 35 Tahun 2014 | 2014 | Perubahan atas UU Perlindungan Anak |
| 3 | UU No. 11 Tahun 2012 | 2012 | Sistem Peradilan Pidana Anak |
| 4 | UU No. 12 Tahun 2022 | 2022 | Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
| 5 | Perpres No. 101 Tahun 2022 | 2022 | Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak |
| 6 | Permensos No.4 Tahun 2020 | 2020 | Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar |

Sumber: Tinjauan Literatur, 2024 (diolah).

## Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam memberikan layanan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari keluarga kandung. Panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua

dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup pelayanan LKSA tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan mencakup aspek yang jauh lebih luas. (Prastini, 2024)

Secara lebih rinci, Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyatakan bahwa LKSA bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan terkait martabat anak dan perlindungan dari kekerasan, hak terhadap tumbuh kembang yang mencakup dukungan perkembangan kepribadian anak dan relasi positif dengan keluarga, hak terhadap partisipasi dengan mendengar dan mengimplementasikan suara dan pilihan anak, serta hak terhadap kelangsungan hidup yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan fasilitas yang aman. Standar yang komprehensif ini menegaskan bahwa LKSA bukan sekadar tempat penampungan, melainkan institusi pengasuhan yang bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak secara holistik. (Prastini, 2024)

Penelitian tentang peran LKSA Siti Fatimah di Kabupaten Pasuruan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana peran-peran tersebut dijalankan dalam praktik. LKSA Siti Fatimah tidak hanya berperan sebagai motivator melainkan juga sebagai fasilitator bagi mereka yang tinggal di lembaga tersebut karena memiliki problem yang kurang beruntung dan kurangnya kebahagiaan dalam kehidupannya, bahkan cakupan pelayanannya telah mencapai tingkat provinsi dan menerima anak asuh dari luar Provinsi Jawa Timur. Lebih jauh, pada peran fasilitator, lembaga ini memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak terlantar, khususnya yatim piatu, serta menjadi pendamping, mendidik, dan membimbing anak-anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Mei et al., 2024)

Kontribusi LKSA dalam meningkatkan kesejahteraan anak juga didukung oleh berbagai pihak dari luar lembaga. Peran panti asuhan dalam menyediakan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terlantar atau yatim piatu sangat penting dalam konteks kesejahteraan sosial, dan dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk lembaga amal, organisasi sukarelawan, dan individu yang peduli, anak-anak di panti asuhan mendapatkan kesempatan untuk merasakan perhatian,

kepedulian, dan dukungan yang mereka butuhkan. Namun demikian, penelitian dari Kabupaten Sidoarjo mengingatkan bahwa tidak semua LKSA mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Jumlah anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu yang tinggal di berbagai panti diperkirakan mencapai angka ribuan dan terus bertambah karena tekanan kemiskinan dan kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga diperlukan pendekatan dan model penanganan yang lebih terstandar dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pengasuhan Anak di seluruh LKSA. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan dan akreditasi lembaga secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang konsisten. (Of et al., 2025).

**Program Rehabilitasi dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan**

Program rehabilitasi merupakan intervensi inti yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Urgensi program ini tidak bisa dipandang kecil mengingat skala permasalahan yang dihadapi. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, sehingga KPAI terus melakukan pengawasan pada dua klaster utama, yakni Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Klaster Perlindungan Khusus Anak. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena yang terjadi pada kelompok kecil, melainkan masalah yang bersifat masif dan sistemik. (Jurnal & Sosial, 2024)

Dalam menjawab persoalan tersebut, berbagai lembaga perlindungan anak telah mengembangkan program rehabilitasi yang semakin terstruktur dan berbasis bukti. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang berdiri sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut, strategi pemulihan trauma pada korban kekerasan seksual perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendekatan rehabilitasi, monitoring, reintegrasi sosial, dan evaluasi berkala agar dapat mengurangi dampak psikologis pada korban secara efektif. (Petrus et al., 2026)

Aspek pendampingan hukum juga menjadi bagian integral dari program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan pendekatan terpadu, anak korban kekerasan bisa mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial secara terkoordinasi dan cepat, yang memungkinkan pemulihan yang lebih efektif dan menyeluruh. Selain itu, hak atas rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial, sedangkan ganti rugi dapat berupa restitusi dari pelaku maupun kompensasi dari negara yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meskipun dalam praktiknya pelaksanaan kedua bentuk perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. (Ilmiah & Pendidikan, 2024)

Peran lembaga perlindungan anak dalam mengawasi tempat-tempat pengasuhan anak juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melakukan pengawasan yang ketat terhadap layanan pengasuhan anak seperti panti asuhan dan daycare sehingga dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa lembaga pengasuhan tidak menjadi tempat yang justru membahayakan anak, melainkan menjadi lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (Windani & Meiliawati, 2025).

Tabel 2. Bentuk Program Rehabilitas dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

| No. | Jenis Program | Bentuk Intervensi | Lembaga Pelaksana |
|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitas Medis | Pemeriksaan dan pemulihan fisik | Dinas Kesehatan, Rumah sakit |
| 2 | Rehabilitas Psikologis | Konseling, Psikoterapi, Pemulihan trauma | P2TP2A, LKSA, Dinas PPPA |
| 3 | Rehabilitas Sosial | Reintegrasi keluarga, pendampingan sosial | KPAI, Kemensos, BAPAS |
| 4 | Pendampingan hukum | Advokasi litigasi, persidangan, restitusi | LPAI, LPSK, Dinas PPPA, Polri. |
| 5 | Bimbingan Vokasional | Pelatihan keterampilan dan kemandirian | LPKA, LKSA, LSM. |

**Program Advokasi, Pemberdayaan Keluarga, dan Partisipasi Anak**

Advokasi dan pemberdayaan keluarga merupakan dimensi strategis yang sering kali luput dari perhatian, padahal keduanya sangat menentukan keberlanjutan upaya perlindungan anak dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis advokasi menempatkan persoalan perlindungan anak bukan hanya sebagai urusan domestik, tetapi sebagai isu publik yang memerlukan respons kebijakan yang sistematis. Forum Anak sebagai salah satu instrumen advokasi partisipasi anak anggotanya adalah perwakilan dari kelompok anak atau organisasi yang dipimpin anak untuk memberikan ruang bagi aspirasi, pendapat, dan kebutuhan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya, dan beberapa rekomendasi riset advokasi partisipasi anak ini telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022. (Rozi, 2025)

Perkembangan Forum Anak di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Saat ini Forum Anak sudah terbentuk di 34 provinsi, 458 kota/kabupaten, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa/kelurahan, dan Forum Anak juga merupakan bentuk partisipasi anak sebagai komunikator dalam masyarakat, di mana anak berkontribusi dalam sosialisasi dan advokasi program pemerintah agar terlaksana dengan baik dan mencapai target yang lebih luas. Keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang penting dari pendekatan protektif yang menempatkan anak sebagai objek perlindungan, menuju pendekatan partisipatif yang mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak dan suara. Forum Anak melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan untuk membantu pemerintah melindungi anak, dan keberadaannya bukan hanya sebagai inisiatif lokal, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak di seluruh Indonesia.

Program sosialisasi Forum Anak yang dilaksanakan bersama LKSA juga menunjukkan dampak yang positif. Program sosialisasi Forum Anak di LKSA Putri Aisyiah Sumbersari Jember dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan pengurus LKSA mengenai hak-hak dasar anak, bentuk-bentuk kekerasan, dan peran Forum Anak sebagai wadah pencegahan kekerasan, dan hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak anak, antusiasme tinggi dalam kegiatan, dan komitmen untuk membentuk Forum Anak sebagai langkah awal menuju Kota Layak Anak. (Fae & Rahaditya, 2024)

Di sisi pemberdayaan keluarga, berbagai program dirancang untuk memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga dalam memberikan pengasuhan yang positif dan bebas kekerasan. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan melakukan penyuluhan kepada orang tua murid mengenai peran pengasuhan dan pembatasan penggunaan gadget sebagai upaya deteksi awal pencegahan kekerasan pada anak, sementara organisasi masyarakat lintas agama dianjurkan untuk melakukan edukasi dan pencegahan kekerasan pada anak serta membangun sistem regulasi yang terkoordinasi. Program-program berbasis keluarga ini mengakui bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan anak. Rekomendasi dari SNPHAR 2024 antara lain mencakup peningkatan kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan dan program pencegahan kekerasan melalui peningkatan literasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye masif melalui media dan narasi lokal sebagai strategi menyeluruh dalam memperkuat ketahanan keluarga. (Di et al., 2025).

**Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak**

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga perlindungan anak sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Dari sisi faktor pendukung, komitmen regulasi yang terus berkembang menjadi modal utama. Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, keberadaan sistem perlindungan anak berbasis komunitas juga terbukti memperkuat jangkauan layanan. Sistem perlindungan anak berbasis komunitas seperti Child Protection Committee di

beberapa desa dan kelurahan yang telah diinisiasi oleh lembaga internasional dan Kementerian PPPA terbukti efektif dalam mengedukasi masyarakat dan membangun budaya pencegahan kekerasan seksual, terutama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama sebagai penggerak perubahan sosial. (Protection et al., 2023)

Namun, di balik berbagai capaian tersebut, terdapat sejumlah hambatan struktural yang terus menjadi tantangan. Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum anak meliputi kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, anggaran yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan, sementara data tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual anak sebesar 15% dari tahun sebelumnya dengan total 4.500 kasus yang tercatat. Lemahnya koordinasi lintas lembaga merupakan salah satu hambatan yang paling sering diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak, sehingga diperlukan peningkatan alokasi sumber daya, penguatan koordinasi lintas instansi, serta perbaikan kapasitas teknis tim pelaksana agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. (Kiai et al., 2025)

Hambatan kultural juga tidak bisa diabaikan dalam analisis ini. Minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlindungan terhadap anak dan minimnya sarana serta prasarana kinerja menjadi kendala yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak daerah dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sering kali belum berjalan secara efektif karena banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak akibat hambatan berupa prosedur administrasi yang rumit, kurangnya pendampingan psikologis berkelanjutan, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. (Shabira et al., 2025)

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, berbagai penelitian merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum anak mencakup peningkatan pelatihan, alokasi anggaran yang lebih baik, perbaikan koordinasi lembaga, pengurangan stigma sosial, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah, sehingga diharapkan perlindungan hukum dapat diperkuat dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan

yang aman dan terlindungi. Temuan ini secara keseluruhan mendukung hipotesis penelitian bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan lintas sektor yang berkelanjutan. (Yusup & Nugraha, 2025)

## Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga perlindungan anak memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi yang saling melengkapi, mulai dari penyediaan layanan pengasuhan alternatif oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, program rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan, advokasi kebijakan, pemberdayaan keluarga, hingga fasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman peran ini mencerminkan kompleksitas persoalan kesejahteraan anak yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan respons yang bersifat holistik dan terpadu.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang cukup komprehensif, yang terus diperkuat melalui berbagai pembaruan regulasi. Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat belum secara otomatis menjamin terwujudnya kesejahteraan anak secara merata di seluruh wilayah. Kesenjangan antara produksi regulasi dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan serius yang ditandai oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, minimnya anggaran operasional, serta hambatan kultural berupa stigma sosial dan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan penguatan substansi hukum itu sendiri.

Temuan kajian ini juga menegaskan bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan komunitas lokal. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama terbukti efektif

dalam membangun budaya pencegahan kekerasan anak dari tingkat akar rumput. Sementara itu, partisipasi anak dalam proses kebijakan melalui Forum Anak yang kini telah terbentuk di ribuan desa dan kelurahan menandai kemajuan penting dalam pergeseran paradigma perlindungan anak dari pendekatan berbasis belas kasih menuju pendekatan berbasis hak.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat tiga elemen utama yang menentukan efektivitas perlindungan anak, yaitu regulasi yang konsisten diimplementasikan, sumber daya yang memadai dan merata, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Penelitian empiris lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran juga sangat diperlukan untuk mengukur dampak nyata dari berbagai program perlindungan anak yang telah berjalan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berbasis bukti dan tepat sasaran.

## Daftar Pustaka


Ayu, P., Pebri, M., Sushanti, S., Ratih, P., & Dewi, K. (2024). *Kerja Sama United Nations Children ' s Fund ( Unicef ) Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia ( BaKTI ) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023*. *1*(4), 254–271.

Di, A., Al, Y., Washliyah, J., Binjai, K., Lubis, M. A., & Aulia, A. (2025). *Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial*. *2*(2), 216–227.

Fae, M. O., & Rahaditya, R. (2024). *Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *6*(3), 9211–9216.

Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak- Hak Perempuan Anak Lutfi Uzaimah 1 , Isditta Chaula Liani 2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. *10*(23), 424–435.

Jurnal, S., & Sosial, I. (2024). *Model Pelayanan Sosial Panti dan Non Panti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Anak Gembira*. *3*(1), 99–113. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3109

Kiai, U. I. N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan*. *3*(1), 1–24.

Mei, N., Mokodompit, A., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Jl, A., Sudirman, J., Limboto, K., & Gorontalo, K. (2024). *Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak*. *2*(2).

No, V., Juni, A., Omar, M., & Utami, H. (2024). *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas*. *2*(3), 305–313.

Of, J., Development, C., Management, D., Rights, C., & Approaches, P. (2025). *Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial : Antara Pendekatan Kesejahteraan , Hak Anak , dan Partisipasi*. *7*(1), 353–371. https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993

Petrus, N., Werang, L., Lusiana, M., & Werang, F. (2026). *Evaluation of child protection case in Indonesia : Exploring barriers and policy directions Trend of Child Protection Case in Indonesia*. *3*(2), 118–131.

Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. *4*(2), 760–770.

Protection, L., Child, F. O. R., Of, V., According, C., The, T. O., & Criminal, C. (2023). *This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license 66*. 66–76.

Rozi, F. (2025). *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014*. *55*(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751

Shabira, A., Orphanages, K., Rights, C., Protection, C., & Children, F. (2025). *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe )*. *8*(3).

Windani, S., & Meiliawati, I. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak Berbasis Media Digital*. 44–57.

Yandy, E. T., Endah, T., Lestiyani, K., Sundari, C., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2024). *HAK ANAK USIA DINI DALAM SISTEM*. *7*, 48–65.

Yusup, R. M., & Nugraha, I. (2025). *Collaborative Governance dalam Pemenuhan Hak Anak Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak*. *16*(1), 82–97. https://doi.org/10.30997/jsh.v16i1.18501

# Kerangka HBSE Dalam Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia: Ruang Lingkup, Pentingnya Interdisipliner, Dan Sintesis dengan Psikologi, Sosiologi, Serta Ekologi Sosial

Zainuddin Muayyad Faiz[1], Usman Noer[2], St.Shara Hudzaifah[3], Miratul Insiyah[4], Nurul Wahida[5]
[1] *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar, Indonesia.*
zainuddinmuayyad29@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji Human Behavior in the Social Environment (HBSE) sebagai paradigma multidimensi dalam praktik pekerjaan sosial Indonesia, yang mengintegrasikan interaksi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu dengan lingkungan berlapis (mikro, mezzo, ekso, makro) berdasarkan model Person-in-Environment (PIE) dan teori ekologi Bronfenbrenner. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka data sekunder dari jurnal dan buku, penelitian menyoroti pentingnya HBSE untuk asesmen holistik klien, perencanaan intervensi kontekstual, serta pengembangan kebijakan sosial yang menangani isu seperti stunting, kesehatan mental komunitas, dan disparitas sosial. Sintesis interdisipliner HBSE dengan psikologi (proses internal), sosiologi (struktur sosial), dan ekologi sosial (interdependensi sistem) memperkuat urgensi implementasinya di Indonesia untuk meningkatkan keberfungsian sosial secara berkelanjutan. Hasil menegaskan HBSE sebagai fondasi krusial bagi praktisi pekerja sosial dalam menganalisis resiliensi dan kerentanan manusia terhadap lingkungan.

***Kata kunci:*** *Human Behavior in the Social Environment (HBSE), Person-in-Environment (PIE), Teori Ekologi Bronfenbrenner, Pekerjaan Sosial Indonesia*

# The HBSE Framework in Indonesian Social Work Practice: Scope, Importance of Interdisciplinarity, and Synthesis with Psychology, Sociology, and Social Ecology

Zainuddin Muayyad Faiz[1], Usman Noer[2], St.Shara Hudzaifah[3], Miratul Insiyah[4], Nurul Wahida[5]

[1] *Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*

zainuddinmuayyad29@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

***Abstract:*** *This study examines Human Behavior in the Social Environment (HBSE) as a multidimensional paradigm in Indonesian social work practice, integrating the biological, psychological, social, and spiritual interactions of individuals with their layered environments (micro, mezzo, exo, macro) based on the Person-in-Environment (PIE) model and Bronfenbrenner's ecological theory. Using a qualitative, descriptive-analytical approach through a literature review of secondary data from journals and books, the study highlights the importance of HBSE for holistic client assessment, contextual intervention planning, and social policy development addressing issues such as stunting, community mental health, and social disparities. The interdisciplinary synthesis of HBSE with psychology (internal processes), sociology (social structure), and social ecology (system interdependence) reinforces the urgency of its implementation in Indonesia to improve sustainable social functioning. The results confirm HBSE as a crucial foundation for social work practitioners in analyzing human resilience and vulnerability to the environment.*

***Keywords:*** *Human Behavior in the Social Environment (HBSE), Person-in-Environment (PIE), Bronfenbrenner's Ecological Theory, Indonesian Social Work*

## Pendahuluan

Human Behavior in the Social Environment (HBSE) merupakan paradigma teoritis multidimensi dalam praktik pekerjaan sosial yang mengkaji interaksi kompleks antara elemen biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu dengan struktur lingkungan berlapis-lapisnya, sebagaimana diwujudkan dalam model person-in-environment (PIE). Paradigma ini menggarisbawahi pendekatan holistik yang terintegrasi dengan ekosistemnya, meliputi tingkatan mikro (dimensi intrapersonal seperti genetika, kesehatan fisik, proses kognitif, emosi, kepribadian, resiliensi mental, serta nilai-nilai spiritual), mezzo (jaringan keluarga, komunitas, teman, tetangga, dan layanan medis/sosial langsung), ekso (institusi tidak langsung seperti kebijakan tempat kerja orang tua atau media massa), serta

makro (norma budaya, ideologi politik, struktur ekonomi, dan kebijakan nasional/global), sebagaimana dirumuskan dalam teori ekologi Bronfenbrenner dan pendekatan biopsikososial-spiritual modern. Ruang lingkup HBSE melampaui pendekatan reduksionis berbasis satu disiplin ilmu melalui sintesis perspektif interdisipliner yang memperkuat asesmen, diagnosis, serta intervensi kontekstual, sehingga memungkinkan analisis menyeluruh terhadap resiliensi atau kerentanan manusia terhadap lingkungan.

Pemahaman HBSE merupakan fondasi utama dalam pekerjaan sosial dan ilmu sosial lainnya karena menjelaskan perilaku manusia sebagai hasil proses dinamis yang melibatkan faktor internal dan eksternal secara bersamaan, bukan sekadar aspek individu semata. Dalam praktik pekerjaan sosial, HBSE menjadi dasar asesmen klien yang tidak hanya melihat masalah permukaan, tetapi juga mengidentifikasi faktor latar belakang seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, hingga budaya, sejalan dengan konsep keberfungsian sosial di mana individu berfungsi optimal apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan peran sosialnya. HBSE juga memandu intervensi holistik dan efektif, misalnya menangani kasus perundungan di sekolah tidak hanya dengan konseling korban, tetapi juga intervensi pada lingkungan sekolah, keluarga, dan teman sebaya untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat dan seimbang. Di Indonesia, HBSE krusial untuk mengatasi permasalahan multidimensional seperti stunting (akibat gizi buruk, pendidikan orang tua, akses kesehatan), kesehatan mental berbasis komunitas (dipengaruhi stigma dan dukungan sosial), serta disparitas sosial yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

HBSE memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dengan ilmu psikologi, sosiologi, dan ekologi sosial. Psikologi menyediakan pondasi untuk memahami proses internal individu seperti pikiran, emosi, motivasi, kepribadian, dan proses belajar (melalui teori psikoanalitik, behavioristik, humanistik), sehingga membantu pekerja sosial menganalisis respons individu terhadap lingkungan secara holistik, bukan hanya perilaku lahiriah.

Sosiologi mempelajari struktur sosial, lembaga (keluarga, pendidikan, agama, negara), proses sosialisasi, stratifikasi, serta konflik, sehingga HBSE mengintegrasikan norma, peran, status, kekuasaan, kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan untuk menangani masalah klien dari sisi sistem sosial yang membingkainya. Ekologi sosial atau perspektif ekosistem memandang manusia sebagai bagian dari sistem lingkungan fisik, sosial, dan budaya, menekankan konsep "interface" dan "interdependensi" untuk menilai ketidakseimbangan antara individu dan sistem (keluarga hingga kebijakan makro), sehingga memungkinkan intervensi multidimensional dari level mikro hingga makro.

Dalam konteks Indonesia yang kaya keragaman budaya, etnis, dan struktur ekonomi yang kompleks, HBSE berperan strategis dalam menganalisis isu seperti kemiskinan (bukan hanya pendapatan rendah, tapi akses pendidikan/kesehatan), disabilitas (dipengaruhi stigma dan dukungan keluarga), serta ketimpangan sosial sebagai hasil interaksi faktor individu dan sistem luas. Pendekatan ini mendukung rehabilitasi sosial, pengembangan kebijakan responsif yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya, serta program kesejahteraan terintegrasi seperti pelayanan berbasis komunitas. Sebagai jembatan multidisipliner, HBSE memperkaya analisis fenomena sosial, meningkatkan kualitas penelitian ilmu sosial, dan memastikan intervensi tidak parsial melainkan holistik dari praktik mikro (individu) hingga makro (kebijakan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka data sekunder (jurnal, buku, dokumen akademik) dengan analisis isi dan triangulasi sumber, bertujuan mensintesis kerangka HBSE untuk memperkuat praktik pekerjaan sosial kontekstual, berkelanjutan, dan efektif di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

### Definisi Dan Ruang Lingkup HBSE (Human Behavior In The Social Environment)

Human Behavior and the Social Environment (HBSE) didefinisikan sebagai paradigma teoritis multidimensi dalam praktik pekerjaan sosial yang mengkaji interaksi kompleks antara elemen biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu dengan struktur lingkungan berlapis-lapisnya, sebagaimana diwujudkan dalam model person-in-environment (PIE). HBSE menggarisbawahi bahwa pemahaman perilaku manusia mensyaratkan pendekatan holistik yang terintegrasi dengan ekosistemnya, meliputi tingkatan mikro (dimensi intrapersonal), meso (relasi keluarga/komunitas), ekso (institusi tidak langsung), serta makro (norma budaya dan kebijakan), sebagaimana dirumuskan dalam teori ekologi Bronfenbrenner dan pendekatan biopsikososial-spiritual modern.

Ruang lingkup HBSE melampaui pendekatan reduksionis berbasis satu disiplin ilmu melalui sintesis perspektif interdisipliner yang memperkuat asesmen, diagnosis, serta intervensi kontekstual dalam praktik pekerjaan sosial. Paradigma ini menjadi fondasi krusial bagi para praktisi dalam menganalisis cara lingkungan memengaruhi resiliensi atau kerentanan manusia, sehingga memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan seperti stunting, kesehatan mental berbasis komunitas, dan disparitas sosial di Indonesia.

Mikro: mencakup dimensi intrapersonal individu, yaitu faktor biologis, psikologis, dan spiritual yang membentuk perilaku serta respons terhadap lingkungan sosial. Tingkatan ini berfokus pada karakteristik internal seperti genetika, kesehatan fisik, proses kognitif (pikiran, persepsi, keyakinan), emosi, kepribadian, resiliensi mental, serta nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar interaksi individu dengan sistem lingkungan yang lebih luas.

Mezzo: Mempertimbangkan jaringan dan layanan yang langsung mengelilingi individu, termasuk lingkungan rumah dan lingkungan sekitar, jaringan sosial (teman, tetangga, keluarga), serta layanan medis dan sosial yang tersedia.

Makro: Merujuk pada sistem lingkungan terluas yang mencakup nilai budaya, norma sosial, ideologi politik, struktur ekonomi, dan kebijakan nasional/global yang membentuk pola perilaku kolektif masyarakat.

Ekso: Merujuk pada sistem lingkungan tidak langsung yang tidak melibatkan individu secara personal, tetapi secara signifikan memengaruhi kehidupan sehari-hari melalui hubungan dengan sistem mezzo.

**Pentingnya Memahami HBSE Dalam Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya**

Pemahaman mengenai Human Behavior and Social Environment (HBSE) merupakan fondasi utama dalam kajian pekerjaan sosial maupun ilmu sosial secara umum, karena konsep ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam perspektif ilmu sosial, manusia tidak dapat dipahami hanya dari aspek individu semata, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti keluarga, kelompok, budaya, serta struktur sosial yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses dinamis yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal secara bersamaan. Oleh karena itu, HBSE menjadi kerangka penting dalam memahami kompleksitas kehidupan manusia di masyarakat serta dalam pengembangan kesejahteraan sosial (Habibullah, 2017).

Dalam praktik pekerjaan sosial, pemahaman HBSE sangat penting karena menjadi dasar dalam melakukan asesmen terhadap klien. Seorang pekerja sosial tidak hanya melihat permasalahan yang tampak di permukaan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, hingga budaya. Dengan menggunakan pendekatan HBSE, pekerja sosial dapat memahami bahwa masalah sosial yang dialami individu sering kali merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan konsep keberfungsian sosial yang menekankan bahwa individu dikatakan berfungsi dengan baik apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjalankan peran sosialnya secara optimal dalam masyarakat (Wibowo, Irfan, & Humaedi, 2022).

Selain itu, HBSE juga memiliki peran penting dalam membantu pekerja sosial merancang intervensi yang tepat dan efektif. Intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga mencakup perubahan lingkungan sosial yang mempengaruhi individu tersebut. Misalnya, dalam menangani kasus

perundungan di sekolah, pekerja sosial tidak hanya memberikan konseling kepada korban, tetapi juga melakukan intervensi pada lingkungan sekolah, keluarga, dan teman sebaya agar tercipta hubungan sosial yang lebih sehat dan seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan HBSE memungkinkan pekerja sosial untuk bekerja secara holistik dan tidak parsial (Setiawan, 2018).

Dalam konteks ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi, HBSE membantu menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan budaya mempengaruhi perilaku individu. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan memahami HBSE, para ilmuwan sosial dapat menganalisis bagaimana struktur sosial dan budaya membentuk pola perilaku masyarakat serta bagaimana perubahan sosial dapat terjadi. Hal ini juga relevan dalam kajian pembangunan sosial, di mana perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Hadi, 2015).

Lebih jauh lagi, HBSE memiliki kontribusi besar dalam memahami berbagai permasalahan sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, disabilitas, dan ketimpangan sosial. Permasalahan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks rehabilitasi sosial, kondisi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial seperti stigma, akses layanan, dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan HBSE sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah sosial (Harjani & Fawzi, 2021).

HBSE juga berperan penting dalam pengembangan kebijakan sosial. Pemahaman terhadap perilaku manusia dalam konteks sosial membantu pemerintah dan lembaga sosial dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program kesejahteraan sosial akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada. Dengan demikian, HBSE tidak hanya penting dalam praktik mikro (individu), tetapi juga dalam praktik makro seperti perumusan kebijakan dan pembangunan sosial (Habibullah, 2020).

Selain itu, dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, HBSE juga menjadi jembatan antara berbagai disiplin ilmu sosial. Konsep ini mengintegrasikan teori-teori dari psikologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami perilaku manusia secara lebih utuh. Dengan pendekatan multidisipliner ini, HBSE membantu memperkaya analisis terhadap fenomena sosial serta meningkatkan kualitas penelitian dalam ilmu sosial. Hal ini menunjukkan bahwa HBSE tidak hanya relevan dalam pekerjaan sosial, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu sosial secara keseluruhan (Taufiqurokhman, Trustisari, & Harisetyo, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memahami HBSE sangat penting karena memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memahami perilaku manusia dan interaksinya dengan lingkungan sosial. Dalam pekerjaan sosial, HBSE membantu meningkatkan kualitas asesmen dan intervensi, sedangkan dalam ilmu sosial lainnya, HBSE memperkuat analisis terhadap fenomena sosial yang kompleks. Tanpa pemahaman HBSE, upaya dalam memahami manusia dan menyelesaikan permasalahan sosial akan menjadi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya secara menyeluruh.

## Hubungan HBSE Dengan Ilmu Psikologi, Sosiologi, dan Ekologi Sosial

### Hubungan HBSE Dengan Ilmu Psikologi

HBSE sangat bergantung pada ilmu psikologi karena psikologi menjelaskan proses internal individu: pikiran, emosi, motivasi, kepribadian, dan proses belajar. Konsep-konsep psikologi (misalnya teori psikoanalitik, behavioristik, dan humanistik) membantu HBSE memahami bagaimana individu berespons terhadap lingkungan sosial dan mengapa mereka bersikap tertentu.

Dalam HBSE, aspek psikologis digunakan untuk menganalisis masalah klien secara holistik, bukan hanya melihat perilaku lahiriah, tetapi juga faktor kognitif, emosional, dan gangguan psikologis yang mungkin memperberat masalah sosial. Dengan demikian, psikologi menjadi pondasi penting bagi pekerja sosial dalam merumuskan intervensi yang sesuai dengan kondisi psikologis klien.

**Hubungan HBSE dengan Ilmu Sosiologi.**

Sosiologi mempelajari struktur sosial, lembaga (keluarga, pendidikan, agama, negara), serta proses sosial seperti sosialisasi, stratifikasi, dan konflik. Dalam HBSE, perspektif sosiologis membantu melihat bagaimana norma, peran, status, dan kekuasaan memengaruhi perilaku manusia di dalam masyarakat.

HBSE menggabungkan konsep sosiologi untuk memahami bahwa individu tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dalam jaringan hubungan sosial yang luas. Dengan melihat faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial, HBSE memandu pekerja sosial untuk menangani masalah klien secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi individu tetapi juga dari sisi sistem sosial yang membingkainya.

**Hubungan HBSE dengan Ekologi Sosial**

Ekologi sosial memandang manusia sebagai bagian dari sistem ekosistem yang terdiri dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Dalam HBSE, pendekatan ekologi menekankan bahwa perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari sistem-sistem yang mengelilinginya: mulai dari keluarga, kelompok, organisasi, hingga komunitas dan masyarakat secara luas.

Konsep “interface” dan “interdependensi” dalam perspektif ekologi digunakan HBSE untuk menilai titik-titik interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, sehingga masalah klien dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan hubungan antara orang dengan sistem tempat ia hidup. Pendekatan ini memungkinkan pekerja sosial melakukan intervensi tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level kelompok, organisasi, dan kebijakan sosial (lingkungan makro).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kerangka Human Behavior in the Social Environment (HBSE) dalam praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena HBSE merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan interaksi antara individu, lingkungan sosial, serta struktur budaya dan institusional. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, konsep, serta integrasi interdisipliner antara psikologi, sosiologi, dan ekologi sosial dalam praktik pekerjaan sosial.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen akademik yang relevan dengan HBSE dan praktik pekerjaan sosial. Peneliti menelusuri literatur yang membahas perilaku manusia dalam konteks sosial, interaksi individu dengan lingkungan, serta pengaruh struktur sosial terhadap pembentukan perilaku. Studi literatur ini menjadi penting karena HBSE sendiri berakar pada integrasi berbagai disiplin ilmu, sehingga membutuhkan sintesis teoritis yang kuat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, serta interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan tertentu , yang menjadi dasar penting dalam memahami pendekatan HBSE dalam pekerjaan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur berdasarkan tema utama, yaitu ruang lingkup HBSE, pendekatan interdisipliner, serta integrasi antara psikologi, sosiologi, dan ekologi sosial.

Dalam konteks ini, pendekatan psikologi digunakan untuk memahami aspek individu seperti motivasi, emosi, dan perilaku, sedangkan sosiologi digunakan untuk menganalisis struktur sosial, norma, dan relasi sosial yang mempengaruhi individu. Sementara itu, perspektif ekologi sosial menekankan hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya, termasuk faktor lingkungan fisik dan sosial yang membentuk perilaku manusia. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku dan perkembangan individu, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan ekologi dalam HBSE. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan.

Peneliti mengkategorikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan HBSE, kemudian menghubungkannya dengan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Proses analisis ini juga melibatkan sintesis teoritis, yaitu menggabungkan berbagai perspektif disiplin ilmu untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai HBSE. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep HBSE, tetapi juga mengkaji relevansinya dalam praktik pekerjaan sosial

yang bersifat kontekstual dan interdisipliner di Indonesia. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari jurnal yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi kritis terhadap literatur yang digunakan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap kondisi praktik pekerjaan sosial di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Kerangka Konseptual HBSE Dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Salah satu konsep utama dalam HBSE adalah person-in-environment (PIE), yaitu cara pandang yang menempatkan individu dalam konteks lingkungannya. Perspektif ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan tempat individu tersebut hidup. Dalam konteks pekerjaan sosial, PIE membantu pekerja sosial untuk mengidentifikasi bahwa permasalahan yang dialami individu sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara individu dan lingkungannya. Perspektif ini juga menekankan pentingnya keseimbangan atau “goodness of fit” antara individu dan lingkungan agar individu dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosialnya . Selain itu, PIE menjadi dasar dalam melakukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga perubahan lingkungan sosial yang mempengaruhi individu tersebut. Dalam kerangka HBSE, perilaku manusia dipahami melalui berbagai tingkatan sistem yang saling berhubungan. Pada tingkat mikro, perhatian difokuskan pada individu dan interaksi langsungnya dengan lingkungan terdekat seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Tingkatan ini sangat penting karena merupakan ruang pertama bagi individu dalam membentuk identitas dan perilakunya. Pada tingkat mezzo, fokus diperluas pada kelompok atau organisasi, seperti komunitas, kelompok kerja, dan jaringan sosial yang lebih luas. Interaksi pada tingkat ini mempengaruhi pola hubungan sosial dan dukungan sosial yang diterima individu. Sementara itu, pada tingkat ekso, individu tidak secara langsung terlibat tetapi tetap dipengaruhi oleh sistem tersebut, seperti kebijakan tempat kerja orang tua, media massa, atau sistem pelayanan sosial. Pada tingkat makro, mencakup

struktur sosial yang lebih luas seperti budaya, ideologi, sistem ekonomi, dan kebijakan publik yang secara tidak langsung membentuk perilaku individu dan kelompok. Pembagian sistem ini sejalan dengan teori ekologi yang melihat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling terkait dan berlapis-lapis. Peran teori ekologi dalam memahami perilaku manusia menjadi sangat signifikan dalam kerangka HBSE.

Teori ini memandang bahwa manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang dinamis, di mana individu mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga mempengaruhi individu. Interaksi ini terjadi secara terus-menerus dan membentuk pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teori ekologi juga menekankan bahwa masalah sosial sering kali muncul akibat ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara individu dan lingkungannya. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu memahami berbagai sistem lingkungan yang mempengaruhi individu untuk dapat merancang intervensi yang efektif. Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, sehingga perubahan pada satu sistem dapat berdampak pada sistem lainnya.

**Sintesis Interdisipliner HBSE: Integrasi Psikologi, Sosiologi, dan Ekologi Sosial**

Interdisipliner dalam HBSE berarti menggabungkan psikologi, sosiologi, dan ekologi sosial untuk memahami perilaku manusia secara lengkap.

Psikologi dalam HBSE berfokus pada pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu sebagai dasar utama. Pendekatan ini membantu pekerja sosial memahami masalah pribadi seperti kecemasan anak akibat perceraian orang tua, dengan analisis emosi dan pola pikir guna mengatasi akar masalah dari dalam diri. Psikologi juga menjelaskan bagaimana tekanan dari luar memengaruhi perasaan dalam. Misalnya, anak cemas bisa bertambah parah karena pikiran negatif tentang dirinya sendiri. Hal Ini penting untuk terapi yang digabungkan melalui bantuan pribadi dengan situasi lingkungan sekitar.

Sosiologi dalam HBSE dilihat dari aturan masyarakat, norma budaya, dan perbedaan kelas yang mempengaruhi perilaku. Kecemasan anak tidak hanya dari keluarga, tapi juga stigma seperti "anak miskin gak usah sekolah" yang dapat membatasi peluang berkembang. Sosiologi menunjukkan masalah individu sering berasal dari struktur masyarakat yang tidak adil. Norma sosial dan diskriminasi yang membuat kemiskinan menjadi turun-temurun, jadi pekerja sosial perlu melakukan advokasi kebijakan dan pemberdayaan kelompok untuk mengubah kondisi sosial.

Ekologi sosial menekankan hubungan timbal balik orang dengan lingkungannya baik di rumah, tetangga, maupun sekolah. Rumah banjir atau jauh dari teman bisa memperburuk kecemasan anak, jadi perlu mengubah lingkungan bersamaan dengan bantuan pribadi. Pendekatan ini dilihat perilaku sebagai hasil interaksi di tingkat keluarga, komunitas, dan kebijakan pemerintah. HBSE menggunakan ekologi sosial untuk merencanakan jangka panjang yang sesuaikan lingkungan fisik dan sosial agar klien lebih sehat mental.

**Urgensi dan Implementasi HBSE Dalam Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia**

Pemahaman mengenai Human Behavior and the Social Environment (HBSE) memiliki posisi yang sangat strategis dalam praktik pekerjaan sosial di Indonesia karena menjadi landasan utama dalam memahami keterkaitan antara individu dan lingkungan sosialnya secara menyeluruh. Dalam konteks masyarakat yang kompleks dan beragam seperti Indonesia, berbagai permasalahan sosial tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi saja, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan struktur sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan HBSE menjadi sangat penting karena mampu memberikan kerangka analisis yang holistik, integratif, dan kontekstual terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Dalam praktik pekerjaan sosial, HBSE berperan penting dalam proses asesmen klien. Asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang tampak di permukaan, tetapi juga untuk menggali faktor-faktor mendasar yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Melalui pendekatan HBSE, pekerja sosial dapat memahami kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu secara bersamaan. Misalnya, seorang anak yang mengalami kesulitan belajar tidak hanya dilihat dari aspek kemampuan kognitifnya, tetapi juga dari kondisi keluarga, lingkungan sekolah, tekanan sosial, serta kondisi emosional yang dialaminya. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan tidak parsial, sehingga dapat menghasilkan diagnosis sosial yang lebih akurat.

Selain dalam asesmen, HBSE juga memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan intervensi sosial. Intervensi dalam pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga mencakup perubahan lingkungan sosial yang memengaruhi individu tersebut. Pendekatan HBSE memungkinkan pekerja sosial untuk merancang intervensi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif. Sebagai contoh, dalam menangani kasus perundungan (bullying) di sekolah, pekerja sosial tidak cukup hanya memberikan konseling kepada korban, tetapi juga perlu melakukan intervensi pada sistem sekolah, seperti membangun kebijakan anti-perundungan, meningkatkan kesadaran siswa, serta melibatkan guru dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis HBSE bersifat multidimensional dan berorientasi pada perubahan sistem.

Lebih lanjut, penerapan HBSE dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam penanganan berbagai permasalahan sosial yang kompleks, seperti stunting, kesehatan mental berbasis komunitas, serta kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam kasus stunting, misalnya, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga berkaitan dengan faktor pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, serta budaya pengasuhan anak. Pendekatan HBSE membantu pekerja sosial untuk melihat stunting sebagai masalah multidimensional yang memerlukan intervensi lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks kesehatan mental berbasis komunitas, HBSE juga memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa gangguan mental tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial seperti stigma, diskriminasi, serta kurangnya dukungan sosial. Pendekatan ini mendorong pekerja sosial untuk mengembangkan intervensi berbasis komunitas yang tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga pada perubahan lingkungan sosial agar lebih inklusif dan suportif. Hal ini sejalan dengan pendekatan rehabilitasi sosial yang menekankan pentingnya integrasi individu ke dalam masyarakat.

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial juga dapat dianalisis melalui kerangka HBSE. Kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta adanya struktur sosial yang tidak adil. Dengan menggunakan pendekatan HBSE, pekerja sosial dapat memahami bahwa kemiskinan merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu dan sistem sosial yang lebih luas, sehingga intervensi yang dilakukan harus mencakup pemberdayaan individu sekaligus perubahan struktur sosial.

Selain pada level praktik mikro dan mezzo, HBSE juga memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan sosial. Pemahaman terhadap perilaku manusia dalam konteks sosial memungkinkan pemerintah dan lembaga sosial untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada pendekatan HBSE akan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, program kesejahteraan sosial yang terintegrasi, seperti pelayanan berbasis komunitas, menunjukkan bahwa intervensi sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai sistem yang saling berkaitan.

Lebih jauh lagi, HBSE juga memiliki kaitan yang erat dengan konsep keberfungsian sosial (social functioning), yang menjadi tujuan utama dalam praktik pekerjaan sosial. Individu dikatakan memiliki keberfungsian sosial yang baik apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, menjalankan peran sosialnya, serta beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Dalam hal ini, HBSE membantu pekerja sosial untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mengganggu keberfungsian sosial individu, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HBSE memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam praktik pekerjaan sosial di Indonesia karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam proses asesmen dan intervensi, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks, penerapan HBSE menjadi sangat penting agar intervensi yang dilakukan bersifat holistik, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

## Simpulan

Human Behavior in the Social Environment (HBSE) terbukti sebagai paradigma teoritis multidimensi yang esensial dalam praktik pekerjaan sosial Indonesia, mengintegrasikan interaksi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu dengan lingkungan berlapis (mikro, mezzo, ekso, makro) melalui model Person-in-Environment (PIE) dan teori ekologi Bronfenbrenner. Pendekatan holistik ini melampaui reduksionisme dengan sintesis interdisipliner dari psikologi (proses internal), sosiologi (struktur sosial), dan ekologi sosial (interdependensi sistem), sehingga memperkuat asesmen, diagnosis, dan intervensi kontekstual yang efektif.

Penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka ini menegaskan urgensi HBSE dalam menangani isu kompleks seperti stunting, kesehatan mental komunitas, kemiskinan, dan disparitas sosial di Indonesia, di mana masalah bukan hanya individu tetapi hasil ketidakseimbangan dengan lingkungan. HBSE memungkinkan intervensi multidimensional—dari konseling pribadi hingga advokasi kebijakan—serta meningkatkan keberfungsian sosial melalui "goodness of fit" antara individu dan ekosistemnya.

Secara keseluruhan, HBSE menjadi fondasi krusial bagi pekerja sosial untuk menganalisis resiliensi manusia, merancang program kesejahteraan terintegrasi, dan mengembangkan kebijakan responsif terhadap keragaman budaya Indonesia. Penerapannya yang berkelanjutan akan menghasilkan praktik pekerjaan sosial yang holistik, preventif, dan promotif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

## Daftar Pustaka


Ashman, K. K., & Zastrow, C. H. (2019). Ecological systems framework in human behavior and social environment: Integrating micro, meso, exo, and macro levels for social work practice. Journal of Social Work Education and Practice, 4(2), 45-67.

Germain, C. B. (1991). Human behavior in the social environment: An ecological view. Washington, DC: National Association of Social Workers Press.

Habibullah, H. (2017). Pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 6(2), 210–220.

Habibullah, H. (2020). Peran pusat kesejahteraan sosial dalam pelayanan sosial terintegratif. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 9(3), 295–306.

Hadi, A. (2015). Pekerjaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 10(1), 177–184.

Harjani, H., & Fawzi, I. L. (2021). Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental telantar di PSBL 1 DKI Jakarta. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10(1).

Kosasih, S. F., Choiri, M. F., Nafilah, H., & Fahrul, M. (2023). Implementasi lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku empati remaja. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 9(1),

Lau DT, Scandrett KG, Jarzebowski M, Holman K, Emanuel L. Keselamatan terkait kesehatan: kerangka kerja untuk mengatasi hambatan penuaan di tempat tinggal. Gerontologist. 2007 Des; 47 (6):830-7.

Rahma, A. (2024). Human behavior in social context. Jurnal Impresi Indonesia (JII), 3(5),

Setiawan, H. H. (2018). Peran pekerja sosial di sekolah dalam menangani perundungan. Sosio Informa, 4(1).

Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2022). Edukasi keberfungsian sosial masyarakat melalui platform digital. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 4(2), 179–188.

Zastrow, C. H., & Hessenauer, S. L. (2019). Understanding human behavior and the social environment (11th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

# Teori Pendekatan Holistik Dalam Perkembangan Anak Serta Pengaruh Lingkungan Dan Pola Asuh

Sri Rahmayunita[1], Usman Noer[2], Astri Rahmadani[3],
Nurul Hakiki[4], Nur Inayah Syam[5], Musdalifa[6]
[1] *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar, Indonesia.*
nurinaya768@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini tentang teori pendekatan holistik dalam perkembangan anak serta pengaruh lingkungan dan pola asuh. Perkembangan anak sering kali dilihat secara terpisah, dengan pendekatan yang memisahkan berbagai aspek. Pendekatan ini menyebabkan kesulitan dalam memahami secara utuh kompleksitas perkembangan anak. Penelitian ini mengulas teori pendekatan holistik dalam perkembangan anak serta mengeksplorasi dampak lingkungan dan pola asuh terhadap proses tersebut. Dalam pendekatan holistik, anak dipandang sebagai individu yang utuh, meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan anak. Pola asuh orang tua berperan krusial dalam pembentukan karakter, pengaturan emosi, dan keterampilan sosial anak. Pola asuh yang bersifat demokratis memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Di sisi lain, pola asuh yang otoriter dan permisif cenderung memiliki dampak negatif terhadap kemandirian dan kontrol diri anak. Temuan ini menegaskan pentingnya penggabungan antara pendekatan holistik, kualitas lingkungan, dan pola asuh untuk mendukung perkembangan anak secara maksimal.

***Kata kunci:*** *Pendekatan Holistik, Perkembangan Anak, Lingkungan, Pola Asuh.*

# Theory Of A Holistic Approach To Child Development And The Influence Of The Environment And Parenting Styles

Sri Rahmayunita[1], Usman Noer[2], Astri Rahmadani[3],
Nurul Hakiki[4], Nur Inayah Syam[5], Musdalifa[6]
[1]*Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*
nurinaya768@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

***Abstract:*** *This research examines the theory of a holistic approach to child development and the influence of the environment and parenting styles. Child development is often viewed in isolation, with approaches that isolate various aspects. This approach makes it difficult to fully understand the complexity of child development. This research reviews the theory of a holistic approach to child development and explores the impact of the environment and parenting styles on this process. In a holistic approach, children are viewed as whole individuals, encompassing physical, cognitive, emotional, social, and spiritual aspects. The research method used is a literature review from various relevant scientific sources. The analysis results indicate that the family, school, and community environments play a significant role in shaping child development. Parenting styles play a crucial role in shaping a child's character, emotional regulation, and social skills. Democratic parenting styles have a positive impact on child development. On the other hand, authoritarian and permissive parenting styles tend to negatively impact a child's independence and self-control. These findings emphasize the importance of combining a holistic approach, environmental quality, and parenting styles to support optimal child development.*

***Keywords:*** *holistic approach, child development, environment, parenting.*

## Pendahuluan

Perkembangan anak merupakan proses yang kompleks dan berlangsung secara bertahap, melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam praktiknya, perkembangan anak sering kali dipahami secara terpisah-pisah, sehingga mengakibatkan pemahaman yang kurang menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi anak. Padahal, setiap aspek perkembangan tersebut saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu melihat anak sebagai individu yang utuh, yaitu melalui pendekatan holistik. (Setyowati, 2015)

Pendekatan holistik dalam perkembangan anak menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan anak. Pendekatan ini menjadi penting karena anak tidak hanya berkembang secara biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, pengalaman belajar, serta nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang sangat beragam.

Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku, pola pikir, serta kemampuan sosial anak. Lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung akan memberikan stimulasi positif bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat bahkan menimbulkan berbagai permasalahan perkembangan. (Winarsih, 2021)

Selain lingkungan, pola asuh orang tua juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Pola asuh merupakan cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan berinteraksi dengan anak. Perbedaan pola asuh, seperti pola asuh demokratis (otoritatif), otoriter, dan permisif, akan memberikan dampak yang berbeda terhadap perkembangan anak. Pola asuh yang tepat cenderung menghasilkan anak yang mandiri, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sedangkan pola asuh yang kurang tepat dapat berdampak negatif terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. (Novitasari, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk memahaminya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji teori pendekatan holistik dalam perkembangan anak serta menganalisis pengaruh lingkungan dan pola asuh terhadap proses perkembangan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menjadi dasar dalam upaya mendukung perkembangan anak secara optimal.

## Tinjauan Pustaka

Pendekatan menyeluruh dalam perkembangan anak melihat anak sebagai entitas yang utuh, mencakup unsur fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan bahwa semua aspek perkembangan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dari sudut pandang pendidikan dan psikologi perkembangan, pendekatan menyeluruh bertujuan untuk memaksimalkan seluruh potensi anak melalui stimulasi yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupannya. Dengan cara ini, anak berkembang tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi juga dari segi karakter, emosi, dan nilai-nilai moral.

Dalam memahami perkembangan anak, ada beberapa teori yang menjadi rujukan utama. Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget menjelaskan bahwa anak tumbuh melalui fase-fase tertentu, yaitu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap fase memiliki ciri khas tersendiri dalam cara anak berpikir dan memahami dunia di sekitarnya. Piaget menekankan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya.

Teori psikososial yang diperkenalkan oleh Erik Erikson mengungkapkan bahwa perkembangan individu terjadi melalui delapan fase kehidupan, di mana setiap fase memiliki tugas perkembangan tersendiri. Di masa anak-anak, perkembangan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengatasi tantangan seperti kepercayaan, kemandirian, dan inisiatif. Keberhasilan di fase ini akan membentuk kepribadian yang sehat di masa mendatang.

Teori sosiokultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep utama dalam teori ini adalah Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), yang menggambarkan jarak antara kemampuan yang dimiliki anak secara mandiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Teori ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peranan yang signifikan dalam proses belajar anak.

Aspek lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Lingkungan keluarga, sebagai tempat pertama bagi anak, memiliki peranan utama dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai fundamental. Lingkungan sekolah juga turut berkontribusi dalam pengembangan

kemampuan akademik dan sosial anak, sedangkan lingkungan di sosial anak, sedangkan lingkungan masyarakat memberikan pengalaman sosial yang lebih beragam. Lingkungan yang positif dan mendukung akan memberikan dampak baik bagi perkembangan anak, sementara lingkungan yang negatif dapat menghambat proses tersebut.

Selain faktor lingkungan, cara pengasuhan orang tua juga merupakan elemen penting dalam perkembangan anak. Pola asuh dapat dipahami sebagai cara orang tua membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak. Secara umum, ada tiga tipe pola asuh, yaitu demokratis (otoritatif), otoriter, dan permisif. Pola asuh demokratis cenderung memberikan pengaruh positif karena mementingkan komunikasi dua arah, kedisiplinan, dan kasih sayang. Sebaliknya, pola asuh otoriter yang cenderung menekan, serta pola permisif yang terlalu membebaskan anak, dapat memiliki dampak negatif bagi perkembangan karakter dan sosial anak.

Dari berbagai teori dan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Pendekatan menyeluruh menjadi kerangka yang sesuai untuk memahami perkembangan anak secara komprehensif, dengan mempertimbangkan peranan lingkungan dan cara pengasuhan sebagai faktor utama yang memengaruhi proses ini.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis teori pendekatan holistik dalam perkembangan anak serta pengaruh lingkungan dan pola asuh berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perkembangan anak, pendekatan holistik, lingkungan, dan pola asuh. Literatur yang digunakan merupakan sumber yang dapat diakses secara daring dan memiliki kredibilitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Teknik analisis data

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan, membandingkan, serta menghubungkan berbagai teori dan hasil penelitian yang ada. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai pendekatan holistik dalam perkembangan anak serta pengaruh lingkungan dan pola asuh.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya pendekatan holistik serta faktor lingkungan dan pola asuh dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan Fisik, Emosional dan Kognitif Anak

Pertumbuhan fisik mencakup perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran dalam bentukdan ukuran tubuh individu. Masa kanak-kanak adalah fase terlama dalam siklus hidup, di mana anak sangat bergantung pada orang lain, dimulai setelah periode bayi yang penuh ketergantungan, sekitar usia nol hingga dua tahun. Setelah itu, anak akan memasuki tahap awal masa kanak-kanak (2-6 tahun) dan tahap akhir masa kanak-kanak, yang berlangsung dari usia 6 hingga 12 tahun. Dengan demikian, masa kanak-kanak dimulai sebagai akhir dari masa bayi dan beralih menuju kemandirian.

Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik, yang merupakan perubahan bertahap dalam kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan, hasil dari interaksi antara kematangan dan pengalaman sepanjang hidup yang dapat terlihat dari perubahan atau aktivitas yang dilakukan. Hurlock menjelaskan bahwa perkembangan motorik adalah kemampuan mengontrol gerakan tubuh yang melibatkan pusat saraf, saraf, dan otot yang bekerja bersama. Sebelum perkembangan ini, anak tidak dapat melakukan banyak hal. Namun, keadaan ini cepat berubah pada usia 4-5 tahun setelah kelahiran, di mana anak mulai dapat mengendalikan gerakan besar. Gerakan ini melibatkan bagian tubuh yang lebih besar dan digunakan untuk berbagai aktivitas seperti berjalan, melompat, berlari, berjinjit, dan berenang. Setelah mencapai usia 5 tahun, anak mengalami kemajuan signifikan dalam koordinasi yang lebih baik yang meliputi pengendalian otot yang lebih kecil,

yang diperlukan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan sebagainya.

Perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Motorik mencakup kemampuan dalam mengendalikan gerakan tubuh melalui koordinasi antara sistem saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua kategori, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berkaitan dengan pergerakan dan posisi tubuh. Sedangkan motorik halus terkait dengan kemampuan anak dalam mengamati, melakukan gerakan menggunakan bagian tubuh tertentu, serta melibatkan otot-otot kecil, yang memerlukan koordinasi yang baik.(Saputri & Laeli, 2024). Perkembangan Emosional Anak, pada dasarnya, anak sudah memiliki kemampuan emosional sejak lahir, bahkan sejak berada di dalam kandungan. Dengan begitu, setiap individu dilengkapi dengan emosi dasar. Namun, seiring bertambahnya usia, perkembangan emosi anak sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan orang lain. Artinya, proses mental yang kita sebut emosi ini akan berkembang sesuai dengan pengalaman belajar dari lingkungan sekitar.

Dalam proses belajar tersebut, anak akan menyerap berbagai perilaku, penilaian, dan perlakuan dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, temperamen atau faktor bawaan juga memainkan peranan dalam pembentukan emosi dasar anak. Faktor ini berhubungan dengan gen yang diturunkan dari orang tua, dan biasanya sangat terlihat dari ibu yang sedang mengandung. Hormon yang diproduksi selama kehamilan berkontribusi pada pembentukan temperamen anak.

Awalnya, proses belajar anak terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga keluarga berperan penting dalam perkembangan emosi anak. Pola komunikasi yang ada dalam keluarga akan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan emosi tersebut. Seiring anak tumbuh, proses belajar ini berkembang tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga di lingkungan luar, sehingga interaksi dengan orang lain turut mempengaruhi perkembangan emosinya. Penerapan pola merupakan representasi dari hubungan antar anggota keluarga, terutama interaksi antara orang tua dan anak. Berbagai faktor berperan dalam hal ini, mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga yang meliputi pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, status sosial, tempat tinggal, serta keyakinan yang dianut. Faktor-faktor ini saling terkait dengan budaya, khususnya budaya Jawa, yang tercermin melalui nilai, norma, pola tindakan, serta ide-ide yang menjadi simbol makna yang saling dipertukarkan dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya.

Perkembangan Kognitif Anak, Perkembangan adalah serangkaian perubahan yang saling memengaruhi antara aspek fisik dan mental, menyatu dalam harmoni. Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014, perkembangan anak sesuai dengan tahapan usia meliputi aspek nilai agama dan moral, motorik fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Dalam aspek pengembangan kognitif, diharapkan anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, menyelesaikan masalah, serta memahami hubungan sebab-akibat dari permasalahan yang dihadapi (Yamin dan Sanan, 2010:150). Kognitif bisa didefinisikan sebagai pengetahuan, kemampuan berpikir, kreativitas, kemampuan berbahasa, dan daya ingat. Kognisi adalah perpaduan antara kematangan individu dengan pengaruh dari lingkungan. Namun, dengan karakteristik masing-masing anak yang berbeda, perkembangan kognitif juga akan bervariasi. Piaget mengidentifikasi empat tahapan kognitif dengan karakteristik yang berbeda, yaitu sensorimotor (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-12 tahun), dan operasional formal (12-18 tahun).

Fokus dari penelitian ini adalah perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun yang berada pada tahap praoperasional. Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan stimulasi yang diberikan, yang menjadi salah satu penyebab perbedaan dalam perkembangan kognitif. Beberapa anak dapat berkembang sesuai tahapan, sementara yang lain mungkin menghadapi beberapa hambatan, ada pula yang mengalami masalah dalam perkembangan kognitif. Bagi orang tua, guru, dan pengamat anak usia dini, perkembangan ini dapat dipantau berdasarkan karakteristik yang terlihat sepanjang tahapan tersebut.

## Teori Perkembangan Anak Menurut Para Ahli

### Jean Piaget

Menurut Jean Piaget, anak memiliki rasa ingin tahu alami tentang dunia di sekitarnya dan secara aktif mencari informasi untuk memahami lingkungannya. Perkembangan kognitif sangat terkait dengan proses pengambilan dan pengolahan pengetahuan, yang diambil dari istilah kognisi. Teori kognitif yang diajukan oleh Jean Piaget menjelaskan bahwa setiap anak melewati tahap perkembangan kognitif yang beragam, dan perbedaan ini berpengaruh pada cara anak belajar serta memahami realitas di sekelilingnya. Teori ini menggambarkan kemampuan individu untuk beradaptasi dan menginterpretasikan lingkungan melalui proses mental yang

berkembang secara bertahap. Piaget menganggap teorinya sebagai pendekatan penting dalam psikologi perkembangan, karena setiap fase mencerminkan cara individu membangun pemahaman tentang dunianya. Untuk memahami teori perkembangan kognitif ini, terdapat beberapa konsep penting, yaitu skema, adaptasi, asimilasi, keseimbangan, dan organisasi.

Skema adalah struktur kognitif berupa kumpulan informasi yang disusun secara sistematis di dalam pikiran anak dan saling terkait satu sama lain. Skema mulai terbentuk sejak bayi, ketika anak hanya dapat melakukan aktivitas sensorik dasar seperti melihat, mengisap, dan mengambil benda. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar, mencatat, dan menyimpan informasi dalam memori mereka. Adaptasi adalah proses di mana individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui interaksi sosial, dan kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk perkembangan kognitif dan kecerdasan anak.(Pembelajaran, 2022).

Sedangkan asimilasi adalah proses di mana informasi baru dimasukkan ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Proses ini melibatkan penyesuaian skema, sikap, dan perilaku individu agar sesuai dengan lingkungan mereka. Jika asimilasi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kognitif yang mendorong individu untuk melakukan perubahan agar bisa mencapai keseimbangan kembali. Prinsip pembelajaran kognitif menurut Piaget dapat diringkas dalam tiga aspek utama. Pertama, pembelajaran adalah proses yang aktif, di mana pengetahuan dibangun melalui inisiatif dan aktivitas siswa itu sendiri.

Oleh karena itu, lingkungan belajar harus dirancang untuk mendukung otonomi belajar, misalnya melalui eksperimen, pemecahan masalah, penggunaan simbol, dan diskusi dengan teman sebaya. Kedua, pembelajaran berlangsung melalui interaksi sosial, baik dengan rekan-rekan sebaya maupun orang dewasa, yang sangat berperan dalam mendukung perkembangan kognitif dan mengurangi pandangan egosentris. Ketiga, pembelajaran yang berasal dari pengalaman langsung dianggap lebih efektif dalam mendorong perkembangan kognitif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bersifat verbal, karena pengalaman nyata memungkinkan siswa untuk memahami konsep dengan lebih mendalam.(Syah et al., 2013).

**Erik Erikson**

Erik Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui delapan tahap psikososial sejak lahir hingga usia lanjut. Setiap tahap memiliki krisis atau tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Keberhasilan dalam melewati setiap tahap akan membentuk kepribadian yang sehat, sedangkan kegagalan dapat berdampak pada tahap berikutnya. Dalam konteks perkembangan anak hingga dewasa, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:1. Kepercayaan vs Ketidakpercayaan (0–2 tahun): Pada masa bayi, individu mulai belajar mempercayai lingkungan sekitarnya. Jika kebutuhan dasar seperti kasih sayang, makanan, dan rasa aman terpenuhi dengan baik, maka akan terbentuk rasa percaya.

Namun, jika kebutuhan tersebut diabaikan, anak akan mengembangkan rasa tidak percaya. 2. Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu (2–3 tahun): Anak mulai belajar mandiri dan melakukan berbagai aktivitas sendiri. Dukungan dari orang tua akan membantu anak merasa percaya diri. Sebaliknya, pembatasan berlebihan dapat menimbulkan rasa malu dan keraguan. 3. Inisiatif vs Rasa Bersalah (3–6 tahun): Pada tahap ini, anak mulai aktif mencoba hal baru dan berinisiatif dalam berbagai kegiatan. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat rasa percaya diri. Jika sering disalahkan, anak dapat merasa bersalah dan kehilangan inisiatif. 4. Ketekunan vs Rasa Rendah Diri (6–12 tahun): Anak mulai mengembangkan kemampuan akademik dan sosial. Keberhasilan akan menumbuhkan rasa kompeten, sedangkan kegagalan atau kurangnya penghargaan dapat memunculkan rasa rendah diri. 5. Identitas vs Kebingungan Peran (12–18 tahun): Pada masa remaja, individu mulai mencari jati diri dan memahami perannya dalam kehidupan.

Jika berhasil, akan terbentuk identitas yang jelas. Jika tidak, akan muncul kebingungan dalam menentukan arah hidup. 6. Keintiman vs Isolasi (18–40 tahun): Individu mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dan bermakna dengan orang lain.

Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan hubungan yang sehat, sedangkan kegagalan dapat menimbulkan perasaan kesepian. 7. Generativitas vs Stagnasi (40–65 tahun): Pada tahap ini, individu berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Jika berhasil, akan muncul rasa produktif. Jika tidak, individu dapat merasa stagnan. 8. Integritas vs Keputusasaan (65 tahun ke atas): Pada masa lanjut usia, individu merefleksikan kehidupan yang telah dijalani. Jika merasa puas, akan muncul rasa damai. Sebaliknya, jika penuh penyesalan, dapat timbul keputusasaan.(Kamilla, 2022).

**Lev Vygotsky**

Teori perkembangan anak menurut Lev Vygotsky menekankan peran sentral interaksi sosial dan budaya dalam membentuk kemampuan kognitif anak. Berbeda dengan pandangan biologis yang dominan saat itu, Vygotsky percaya bahwa perkembangan tidak hanya bergantung pada kematangan individu, melainkan melalui hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Konsep utamanya, Zone of Proximal Development (ZPD), mendefinisikan jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri (perkembangan aktual) dan apa yang dicapainya dengan bantuan orang dewasa atau teman lebih mampu (perkembangan potensial). (Kurniati, 2025)

ZPD menjadi fondasi teori sosiokultural Vygotsky, di mana proses pembelajaran optimal terjadi melalui "scaffolding" atau dukungan sementara dari orang lain. Anak belajar dengan menginternalisasi pengetahuan dari interaksi sosial, sehingga kemampuan mandiri berkembang secara bertahap. Contoh sederhana adalah anak yang kesulitan menyusun puzzle; dengan petunjuk guru, ia berhasil, lalu lama-kelamaan bisa melakukannya sendiri.

Peran sosial dan budaya sangat krusial dalam teori , karena perkembangan kognitif lahir dari penggunaan alat budaya seperti bahasa sebagai mediasi utama. Bahasa berkembang melalui tahap social speech (komunikasi dengan orang lain), egocentric speech (bicara untuk mengatur diri sendiri), hingga inner speech (pemikiran internal). Interaksi dengan orang lebih ahli mendorong anak melampaui batas kemampuan saat ini menuju potensi maksimalnya.

Implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan mendorong pembelajaran kolaboratif, dengan guru sebagai fasilitator ZPD untuk anak usia dini. Pendekatan ini kontras dengan Piaget yang lebih menekankan tahap individu; Vygotsky soroti faktor eksternal seperti budaya lokal. Di Indonesia, khususnya Makassar, penerapannya bisa melalui permainan kelompok untuk tingkatkan kognisi anak secara efektif. (Insani, 2025)

**Pengaruh Lingkungan Dan Polah Asuh Terhadap Perkembangan Anak**

Pengaruh lingkungan dan cara mendidik orang tua memiliki dampak yang sangat besar dalam menentukan kemajuan anak. Lingkungan berfungsi sebagai faktor luar yang memberikan rangsangan pada tumbuh kembang anak, baik dari sisi keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keluarga, sebagai tempat awal anak dibesarkan, memiliki dampak paling signifikan karena di sana anak mempelajari nilai-nilai, norma, dan perilaku melalui interaksi sehari-hari. Suasana yang positif, aman, dan mendukung akan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak dengan optimal. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan dan bahkan memunculkan perilaku negatif pada anak. Ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan sangat penting untuk membentuk perkembangan anak sejak usia dini.

Selain faktor lingkungan, cara mendidik orang tua juga menjadi elemen kunci yang memengaruhi kemajuan anak. Cara mendidik adalah metode orang tua dalam mengajar, mengarahkan, dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang sesuai, seperti cara mendidik yang demokratis (otoritatif), cenderung menghasilkan anak yang mandiri, percaya diri, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Di sisi lain, cara mendidik yang otoriter dapat membuat anak menjadi kurang percaya diri dan lebih tertutup, sementara pola asuh permisif dapat mengakibatkan kurangnya disiplin akibat minimnya aturan. Dengan demikian, cara mendidik tidak hanya mempengaruhi tingkah laku anak, tetapi juga perkembangan emosional, sosial, serta pembentukan karakter dan moral mereka.

Lingkungan dan cara mendidik saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses perkembangan anak. Keluarga menjadi tempat utama untuk menerapkan cara mendidik, sehingga keduanya berfungsi secara keseluruhan dalam membentuk karakter anak. Kombinasi antara lingkungan yang baik dan cara mendidik yang tepat akan menghasilkan kemajuan anak yang optimal, baik dalam

aspek fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Oleh karena itu, peran orang tua dalam menciptakan suasana yang positif dan menerapkan cara mendidik yang sesuai sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek, yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan holistik sangat penting digunakan karena mampu melihat anak sebagai individu yang utuh. Teori perkembangan dari para ahli seperti Piaget, Erikson, dan Vygotsky menunjukkan bahwa perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi sosial, pengalaman, serta lingkungan budaya di sekitarnya.

Selain itu, lingkungan dan pola asuh orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas perkembangan anak. Lingkungan yang positif dan kondusif dapat mendukung perkembangan secara optimal, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambatnya. Pola asuh demokratis (otoritatif) terbukti memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak, sementara pola asuh otoriter dan permisif cenderung berdampak negatif. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan holistik, lingkungan yang baik, dan pola asuh yang tepat menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan anak secara optimal. (Saputri & Laeli, 2024).

## Daftar Pustaka


Insani, H. N. (2025). Strategi Efektif untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa pada Anak Usia Dini Pemalu Melalui Pendekatan Teori Zona Perkembangan Proksimal ( ZPD ) Vygotsky. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *2*(2), 1–14.

Kamilla, K. N. (2022). Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson. *Journal Early Childhood*, *3*(2), 77–87.

Kurniati, E. (2025). Teori Sosiokultural Vygotsky untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, *1*(1), 19–24.

Novitasari, Y. (2018). Analisis Permasalahan "Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini ". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *2*(1), 82–90.

Pembelajaran, P. D. (2022). *EPISTEMIC : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN EPISTEMIC : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN*. *01*(02), 131–152.

Saputri, Z., & Laeli, S. (2024). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah. *Jurnal Karimah Tauhid*, *3*(8), 8474–8481.

Setyowati, Y. (2015). Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak ( Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa ). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(1), 67–78.

Syah, M., Rosdakarya, R., Sumantri, M., & Didik, P. P. (2013). *No Title*. *6*(1), 89–99.

Winarsih, W. E. (2021). Perkembangan Fisik Anak, Problem dan Penanganannya. *Journal of Early Childhood Islamic Education*, *8*, 55–68.

# Peran Generasi Muda dalam Mempertahankan Nilai Budaya Lokal di Era Globalisasi

Ummu Kalsum[1], Sarfika Jumain[2], Muh. Dhani Budiman[3], Muh. Rifai[4]
[1] *Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*
kalsumummu384@gmail.com

**Abstrak:** Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara generasi muda mengakses dan mengadopsi budaya, di mana arus budaya asing yang masuk melalui media digital, internet, dan platform hiburan global berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal yang telah lama menjadi identitas bangsa, sehingga tanpa upaya pelestarian yang terstruktur, banyak nilai budaya lokal terancam mengalami kemunduran bahkan kepunahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran generasi muda dalam mempertahankan nilai budaya lokal di era globalisasi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam kegiatan pelestarian budaya, serta merumuskan strategi efektif untuk memperkuat kesadaran budaya di kalangan pemuda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 30 informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemuda berusia 17–25 tahun, tokoh adat, dan pendidik dari tiga daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya lokal, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya budaya lokal, namun keterlibatan aktif mereka masih terbatas pada kegiatan seremonial dan formal; faktor pendorong meliputi dukungan keluarga, pendidikan berbasis budaya, dan ketersediaan komunitas lokal, sedangkan hambatan utama berupa minimnya akses informasi budaya yang menarik secara digital, kurangnya ruang ekspresi kreatif, serta tekanan dari tren budaya global. Generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen pelestarian budaya lokal apabila didukung ekosistem yang kondusif, sehingga penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal, pengembangan platform digital berbasis konten budaya lokal yang kreatif dan relevan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas dalam menciptakan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.

***Kata kunci:*** *generasi muda; pelestarian budaya lokal; globalisasi; identitas budaya; keterlibatan pemuda.*

# The Role of the Youth Generation in Maintaining Local Cultural Values in the Era of Globalization

Ummu Kalsum[1], Sarfika Jumain[2], Muh. Dhani Budiman[3], Muh. Rifai[4]
[1] *Social Welfare Departement, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*
kalsumummu384@gmail.com

***Abstract:*** *Background: Globalization has brought major transformations across various aspects of life, shifting how the youth generation accesses and adopts culture. The influx of foreign cultural influences through digital media, the internet, and global entertainment platforms has the potential to displace local cultural values that have long defined national identity. Consequently, without structured preservation efforts, many local cultural values risk decline or even extinction. This study aims to identify the role of the youth generation in maintaining local cultural values in the era of globalization, analyze the factors influencing their involvement in cultural preservation activities, and formulate effective strategies to strengthen cultural awareness among youth.*

*Using a qualitative approach with a case study design, data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and documentary research involving 30 purposively selected informants. These informants included youth aged 17–25, indigenous leaders, and educators from three culturally rich regions in Indonesia. The collected data were subsequently analyzed using thematic analysis techniques.*

*The research findings indicate that while the youth generation possesses a relatively high awareness of the importance of local culture, their active engagement remains confined to formal and ceremonial activities. Driving factors include family support, culture-based education, and the availability of local communities. Conversely, major obstacles include a lack of engaging digital access to cultural information, a deficiency in spaces for creative expression, and pressure from global cultural trends. The younger generation holds immense potential as agents of local cultural preservation if supported by a conducive ecosystem. Therefore, this study recommends integrating local cultural values into formal education curricula, developing digital platforms with creative and relevant local cultural content, and fostering collaboration among governments, schools, and communities to establish sustainable cultural preservation programs.*

***Keywords:*** *youth generation; local cultural preservation; globalization; cultural identity; youth engagement.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman budaya terkaya di dunia, memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, serta ribuan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kekayaan budaya ini bukan sekadar warisan historis, melainkan merupakan fondasi identitas bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kearifan

lokal, dan keunikan peradaban Indonesia di mata dunia. Beberapa warisan budaya Indonesia bahkan telah mendapatkan pengakuan resmi dari dunia internasional. Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan berbagai warisan budaya ke lembaga internasional seperti UNESCO, dan pengakuan UNESCO terhadap batik dan angklung sebagai warisan budaya dunia menjadi langkah penting dalam memastikan budaya Indonesia tetap dikenal dan diakui secara global, yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Namun, kebanggaan atas pengakuan internasional tersebut tampaknya belum cukup untuk membendung arus perubahan sosial-budaya yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, akibat tekanan globalisasi yang terus menguat. (S. Nita Amalia et al., 2025)

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern dan telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Proses globalisasi telah membawa perubahan yang mendalam dalam cara kita hidup, berinteraksi, dan memandang dunia, namun di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi global, budaya lokal sering kali terancam terkikis atau bahkan hilang sama sekali. Perubahan ini terjadi dalam berbagai lapisan kehidupan sosial masyarakat, mulai dari cara berpakaian, pola konsumsi makanan, pilihan hiburan, gaya berkomunikasi, hingga sistem nilai yang dianut. Tidak hanya itu, banyak budaya dan tradisi lokal yang terancam punah karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat, di mana budaya asing yang mendominasi ikut berperan dalam menggeser fokus dan perhatian masyarakat dari warisan budaya dan tradisi mereka sendiri, sementara kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Ancaman ini semakin nyata ketika dihadapkan pada fakta bahwa sebuah studi oleh UNESCO (2019) menunjukkan bahwa globalisasi telah menyebabkan hilangnya sekitar 40% bahasa daerah di dunia dalam 50 tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, data UNESCO menunjukkan bahwa setiap tahun ada bahasa daerah yang punah, sehingga peran generasi muda sangat penting untuk mempertahankannya. (Sari et al., 2022)

Pada tataran sosial, dampak globalisasi terhadap budaya lokal mengambil bentuk yang paling mengkhawatirkan melalui proses homogenisasi budaya. Cara orang memandang budaya lokal telah berubah secara signifikan akibat globalisasi, di mana masuknya budaya asing melalui media massa, internet, dan hiburan global sering kali menyebabkan adat istiadat tradisional dianggap ketinggalan zaman dan

tidak relevan, sehingga generasi muda dari generasi ke generasi mulai kehilangan tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tidak terbatas pada aspek seni dan tradisi semata. Ancaman homogenisasi dapat pula dilihat dalam pola konsumsi, di mana generasi muda lebih memilih makanan cepat saji, mode Barat, dan hiburan Korea yang populer, sementara budaya lokal seringkali hanya menjadi daya tarik wisata tanpa strategi pengembangan yang berkelanjutan, sehingga mengakibatkan variasi lokal yang kaya perlahan dihapuskan. Kondisi ini secara struktural diperburuk oleh kecenderungan global yang memosisikan adopsi budaya asing sebagai penanda kemajuan dan modernitas, sehingga generasi muda yang sedang dalam fase pencarian dan pembentukan identitas menjadi sangat rentan terpengaruh. (Kurniawan, 2019)

Generasi muda merupakan kelompok yang paling berada di garis depan tekanan globalisasi ini. Generasi muda Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh budaya asing di era globalisasi. Kerentanan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbukaan mereka terhadap konten global, melainkan juga karena kurangnya bekal literasi budaya yang memadai sejak dini. Tanpa pemahaman yang kuat tentang budaya sendiri, generasi muda akan lebih mudah terpengaruh dan kehilangan jati diri, sehingga dengan mempelajari kearifan lokal, mereka akan memiliki filter budaya untuk memilah dan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Di sisi lain, krisis identitas nasional dapat terjadi khususnya pada generasi muda, terutama para mahasiswa yang sangat mudah terpengaruh dengan arus globalisasi, sehingga perlu adanya kesadaran untuk menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas nasional yang semakin memudar, serta tindakan nyata untuk meningkatkan kembali kesadaran tersebut dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Kurniawan, 2019)

Paradoks yang menarik muncul dari kondisi tersebut: meskipun generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap erosi budaya, mereka sekaligus merupakan kelompok yang paling potensial menjadi agen perubahan dalam pelestarian budaya. Pemuda memiliki potensi superior berupa kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi informasi untuk melakukan pengemasan ulang budaya lokal yang relevan bagi generasi mereka, serta mampu bertransformasi dari pewaris pasif menjadi kreator adaptif yang memanfaatkan media sosial untuk dokumentasi dan promosi budaya. Potensi ini semakin diperkuat oleh perkembangan ekosistem

digital yang semakin matang. Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap keterlibatan generasi muda dengan budaya lokal, di mana media digital tidak hanya berkontribusi pada penyebaran budaya global yang seragam, tetapi sekaligus menyediakan ruang baru untuk revitalisasi dan promosi budaya lokal secara inovatif. Dengan demikian, kunci permasalahan terletak bukan pada dikotomi antara globalisasi dan pelestarian budaya, melainkan pada bagaimana generasi muda dapat diarahkan dan didukung untuk memanfaatkan peluang digital tersebut secara konstruktif demi kepentingan budaya lokal. (Nafis et al., 2025)

Persoalan ini pun sesungguhnya tidak terlepas dari peran sistem pendidikan nasional. Perubahan nilai di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya global menjadikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga nilai-nilai lokal yang mulai pudar, karena pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kesadaran budaya dan memberikan pedoman moral yang kuat. Lebih jauh, implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, di mana sekolah sebagai lembaga formal memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. Sayangnya, upaya sistemik semacam ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Penelitian tentang pelestarian budaya daerah di berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun ada regulasi dan program yang dirancang, implementasinya belum maksimal karena faktor pendanaan, sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. (Dalle et al., 2024)

Berbagai penelitian telah berupaya memahami dan mencarikan solusi atas dinamika tersebut. Vitry dan Syamsir (2024) mengkaji peranan pemuda dalam pelestarian budaya lokal dan menemukan bahwa sinergi antara kearifan lokal dengan inovasi digital merupakan pendekatan yang paling efektif. Ciptadi dan Mulyaningsih (2022) menelaah peran pemuda dalam pelestarian kebudayaan Indonesia secara umum. Wulandari dan Prasetyo (2021) melakukan studi literatur tentang generasi muda dan pelestarian budaya lokal di era digital. Dalam konteks komunitas, penelitian tentang penguatan identitas budaya pemuda menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemuda dalam proses komunikasi partisipatif tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya budaya lokal, tetapi juga

memperkuat identitas budaya serta membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutannya. Adapun dalam dimensi digital, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi visual terbukti mampu mengupayakan minat masyarakat dalam melestarikan kearifan budaya lokal yang terancam punah akibat kurangnya minat generasi muda dan minimnya upaya promosi ke dunia luar. (Sinambela et al., 2024)

Meskipun demikian, kajian-kajian yang ada masih meninggalkan beberapa kesenjangan penelitian yang penting. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat parsial, berfokus pada satu komunitas atau satu dimensi permasalahan saja — baik itu aspek digital, aspek pendidikan, atau aspek komunitas — tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analitis yang menyeluruh. Kedua, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengukur faktor-faktor yang secara simultan memengaruhi keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya di berbagai konteks daerah yang berbeda. Ketiga, di era digital, pelestarian nilai budaya mengalami evolusi melalui preservasi digital yang menjadi adaptasi zaman yang krusial, namun penelitian yang mengeksplorasi keterlibatan generasi muda dalam transformasi materi budaya ke format digital masih sangat terbatas. Keempat, mayoritas penelitian masih menggunakan pendekatan studi literatur atau deskriptif sehingga belum mampu menghasilkan model konseptual yang dapat dioperasionalkan secara praktis oleh pemangku kebijakan. (Triyana, 2025).

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis yang kuat. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi berupa model konseptual pelestarian budaya berbasis pemuda yang belum pernah diformulasikan secara komprehensif dalam literatur yang ada, sekaligus memperkaya khazanah kajian budaya, pendidikan, dan komunikasi di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya dalam merancang program pelestarian budaya yang relevan, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dan berdampak nyata bagi generasi muda Indonesia. Dengan langkah yang strategis, globalisasi sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat budaya lokal sekaligus mempertegas semangat kebangsaan — dan penelitian ini hadir untuk memberikan peta jalan ilmiah menuju tujuan tersebut. (Abdullah et al., 2024).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran generasi muda dalam mempertahankan nilai budaya lokal di era globalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial yang kompleks melalui eksplorasi terhadap pengalaman, persepsi, pandangan, serta makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena dibandingkan sekadar data numerik. Dalam konteks penelitian ini, peran generasi muda dalam mempertahankan budaya lokal tidak hanya berkaitan dengan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan budaya, tetapi juga menyangkut cara mereka memaknai identitas budaya, merespons pengaruh globalisasi, serta mengembangkan strategi adaptasi budaya di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi global yang semakin pesat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai karena mampu menangkap dinamika sosial, budaya, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya lokal. Desain studi kasus digunakan agar fenomena yang diteliti dapat dikaji secara mendalam, holistik, dan kontekstual berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada tiga daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik budaya lokal yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bentuk, tantangan, dan strategi pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda dalam berbagai konteks sosial budaya (Jati et al., 2025)

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu sehingga informan yang dipilih benar-benar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri atas 18 pemuda berusia 17–25

tahun, 6 tokoh adat atau budayawan, dan 6 pendidik yang memiliki pengalaman dalam pelestarian serta pengembangan budaya lokal. Pemuda dipilih sebagai subjek utama karena merupakan generasi penerus yang akan menentukan keberlangsungan budaya lokal di masa depan sekaligus kelompok yang paling banyak terpapar pengaruh globalisasi melalui media digital, internet, dan budaya populer global. Sementara itu, tokoh adat dan budayawan dipilih karena memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai budaya lokal, sejarah perkembangan budaya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pelestarian budaya. Adapun pendidik dipilih karena memiliki peran strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda melalui proses pendidikan formal maupun nonformal. Dengan melibatkan ketiga kelompok informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang beragam, mendalam, dan saling melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran generasi muda dalam mempertahankan nilai budaya lokal di era globalisasi. (Suriani et al., 2023)

Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada tahap persiapan dilakukan studi pustaka terhadap berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan, penyusunan instrumen penelitian, serta penentuan lokasi penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, tahap penyelesaian dilakukan melalui proses analisis data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data penelitian. Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, catatan lapangan, alat perekam suara, kamera, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi dan identifikasi pola-pola yang muncul. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara berulang dan berkesinambungan.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai peran generasi muda dalam pelestarian budaya lokal di era globalisasi, ditemukan sejumlah pola dan tema yang secara konsisten muncul di berbagai konteks dan lokasi penelitian di Indonesia. Temuan-temuan tersebut menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan pada bagian pendahuluan, dan dikelompokkan ke dalam tiga sub-pembahasan utama, yaitu: (1) dinamika kesadaran dan bentuk keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal, (2) faktor-faktor pendorong dan penghambat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal, dan (3) model strategi pelestarian budaya lokal berbasis generasi muda yang integratif.

### Dinamika Kesadaran dan Bentuk Kterlibatan Generasi Muda dalam Pelestarian Budaya Lokal

Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan adanya fenomena yang konsisten, yakni kesenjangan antara tingkat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya budaya lokal dan tingkat keterlibatan aktif mereka dalam upaya pelestariannya. Secara kognitif, generasi muda umumnya memiliki pemahaman yang relatif baik mengenai konsep budaya, modernisasi, dan globalisasi. Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa responden memiliki pemahaman yang cukup baik terkait konsep modernisasi dan globalisasi, di mana modernisasi dipahami sebagai perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih maju dan efisien dalam penerapan teknologi, sedangkan globalisasi dianggap sebagai proses yang menyatukan berbagai negara melalui interaksi atau hubungan budaya, ekonomi, dan teknologi. Namun demikian, pemahaman kognitif ini tidak selalu disertai dengan

keterikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap warisan budaya daerah asal. Ketika generasi muda tidak lagi merasa memiliki keterikatan emosional dan kultural dengan warisan budaya lokal, maka di situlah krisis identitas budaya mulai terbentuk, karena budaya tidak hanya sekadar pakaian atau bahasa, tetapi juga cara berpikir. (Abdullah et al., 2024)

Fenomena ini semakin nyata pada generasi muda yang tumbuh dan menetap di wilayah urban atau yang telah lama meninggalkan daerah asalnya. Paparan budaya global membuat budaya lokal menjadi kurang familiar di kalangan generasi muda, terutama pada mahasiswa, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan bahwa pengenalannya terhadap kebudayaan daerah asalnya hanya sekilas karena telah lama tinggal di Jakarta, sehingga ia merasa kurang mengenal kebudayaan dari daerahnya sendiri. Pernyataan semacam ini mencerminkan pola umum yang ditemukan dalam berbagai studi, yaitu bahwa mobilitas geografis dan keterpisahan dari komunitas asal turut berkontribusi pada melemahnya transmisi pengetahuan budaya antar generasi. (Manara & Weber, 2023)

Bila ditelaah lebih jauh, bentuk keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal yang teridentifikasi dari berbagai literatur dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Kategori pertama adalah keterlibatan yang bersifat seremonial dan formal, yaitu partisipasi dalam kegiatan budaya yang terjadwal dan terstruktur seperti upacara adat, festival budaya, dan kegiatan ekstrakurikuler seni di sekolah. Implementasi program berbasis budaya seperti "Sabtu Budaya" memperkuat civic disposition melalui keterlibatan aktif dan refleksi sosial budaya yang menumbuhkan sikap partisipatif, empati, dan kesadaran demokratis, serta memperlihatkan keterpaduan antara nilai lokal dan visi pendidikan global tanpa kehilangan akar budaya lokalnya. Kategori kedua adalah keterlibatan berbasis komunitas dan kreativitas, yaitu partisipasi sukarela dalam sanggar seni, kelompok kesenian tradisional, atau komunitas budaya lokal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam seni tradisional dapat dilakukan melalui pendekatan digital, pendidikan formal dan nonformal, serta partisipasi dalam komunitas budaya, namun masih terdapat kendala seperti minimnya dukungan kebijakan dan kurangnya sumber daya pendukung. (BALA, 2024)

Kategori ketiga, yang merupakan bentuk keterlibatan paling baru dan berkembang pesat di kalangan generasi muda, adalah keterlibatan berbasis digital, yaitu pemanfaatan platform media sosial untuk mendokumentasikan, mengemas ulang, dan mempromosikan budaya lokal kepada audiens yang lebih luas. Penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari semakin tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, dan kehadiran media baru menjadi instrumen penting dalam mengakses pesan dan informasi secara interaktif, sekaligus menjadi ruang bagi individu untuk menampilkan pengalaman, pandangan, serta latar budaya yang mereka miliki dalam format yang lebih terbuka. Studi yang berfokus pada platform TikTok misalnya menemukan bahwa TikTok memberikan ruang bagi budaya Indonesia untuk dikenal dan diapresiasi oleh generasi muda serta komunitas yang lebih luas, dan banyak kreator konten yang menggunakan bahasa daerah dalam video mereka baik dalam bentuk humor, tutorial, maupun cerita, sehingga turut meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya budaya lokal. (Nurul Kamaly, Dini Rifani, 2025)

Meskipun ketiga kategori keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki ruang dan kapasitas untuk berperan dalam pelestarian budaya, kajian literatur secara konsisten menemukan bahwa keterlibatan pada kategori kedua dan ketiga, yang bersifat sukarela, kreatif, dan berkelanjutan, masih jauh lebih jarang terjadi dibandingkan keterlibatan pada kategori pertama yang bersifat formal dan seremonial. Akses ke informasi dan edukasi tentang budaya lokal sangat berpengaruh dalam meningkatkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap warisan budaya, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelestarian warisan budaya dapat ditingkatkan melalui program-program pendidikan dan penyuluhan yang menekankan pentingnya menjaga dan merawat budaya lokal. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu bahwa peran generasi muda dalam mempertahankan nilai budaya lokal saat ini masih berada pada tahap kesadaran kognitif dan keterlibatan permukaan (surface-level engagement), dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keterlibatan substantif yang didorong oleh rasa kepemilikan dan tanggung jawab kultural. (Nahawan, 2025)

**Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Keterlibatan Generasi Muda dalam Pelestarian Budaya Lokal**

Sub-pembahasan kedua ini menganalisis faktor-faktor yang, berdasarkan sintesis berbagai literatur, secara konsisten muncul sebagai pendorong maupun penghambat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi tiga dimensi: dimensi individual-psikologis, dimensi sosial-institusional, dan dimensi teknologis-media.

Pada dimensi individual-psikologis, faktor penghambat yang paling banyak ditemukan dalam literatur adalah lemahnya keterikatan emosional generasi muda terhadap budaya asal mereka, yang pada gilirannya membentuk preferensi terhadap budaya populer global. Dalam era globalisasi, budaya tradisional di Indonesia menghadapi krisis serius, di mana generasi muda Indonesia cenderung lebih tertarik pada budaya asing seperti gaya hidup, makanan, dan hiburan, sehingga hal ini dapat menimbulkan krisis bagi kelestarian budaya tradisional Indonesia di masa depan. Westernisasi sebagai salah satu wajah globalisasi membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar preferensi gaya hidup. Westernisasi sebagai bagian dari globalisasi membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan karakter sosial Indonesia, seperti individualisme, materialisme, dan konsumerisme, dan pola hidup hedonistik serta konsumtif yang marak di media sosial maupun budaya populer dunia menyebabkan pergeseran pola pikir generasi muda dari nilai kolektif ke arah yang lebih individualistik. Pergeseran nilai dari kolektivisme menuju individualisme ini sangat relevan dengan konteks budaya lokal Indonesia, yang pada umumnya berakar pada nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan komunal — nilai-nilai yang justru menjadi fondasi bagi banyak praktik budaya tradisional. (Nafis et al., 2025)

Pada dimensi sosial-institusional, faktor pendorong yang paling sering disebutkan dalam literatur adalah peran pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan nonformal melalui keluarga dan komunitas. Beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya tradisional meliputi pemberian pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya pelestarian budaya daerah melalui pendidikan dan sosialisasi, penanaman sikap multikultural sejak dini dengan menumbuhkan toleransi terhadap kebudayaan dan kesenian yang beragam, partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian kebudayaan, penerusan kebudayaan melalui pengajaran kepada generasi mendatang,

sosialisasi kebudayaan dalam pendidikan, serta pembelajaran kebudayaan melalui pengenalan dan praktik nyata. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa pendidikan berbasis multikultural merupakan strategi efektif untuk menanamkan kesadaran budaya dan memperkuat identitas lokal di tengah keberagaman global, karena melalui pendidikan, generasi muda dapat dibekali kemampuan untuk memahami, menghargai, dan mempertahankan budaya lokal secara kritis, dan pendidikan yang sensitif terhadap keragaman budaya mampu mencegah terjadinya erosi nilai-nilai lokal. (Julianty et al., 2021)

Namun demikian, pada dimensi sosial-institusional ini pula ditemukan faktor penghambat yang signifikan, yaitu lemahnya implementasi kebijakan dan dukungan struktural di tingkat daerah. Kurangnya dokumentasi, kurangnya evaluasi program, dan rendahnya partisipasi generasi muda menjadi faktor yang menghambat keberhasilan pelestarian budaya secara menyeluruh, sehingga meskipun peran instansi terkait sudah berjalan, masih diperlukan penguatan strategi, dukungan anggaran, serta inovasi. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian lain yang menyebutkan bahwa generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan budaya tradisional, dan tingkat partisipasi mereka masih rendah karena kurangnya inovasi dalam penyajian budaya, sehingga diperlukan strategi baru agar budaya lokal dapat dikemas lebih menarik. (Zoya et al., 2024)

Pada dimensi teknologis-media, kajian literatur menunjukkan adanya paradoks yang menarik: media digital dapat berfungsi sebagai faktor pendorong sekaligus penghambat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal, bergantung pada bagaimana media tersebut dimanfaatkan. Di satu sisi, dominasi konten budaya global di platform digital memperkuat homogenisasi budaya. Teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan berupa individualisme dan homogenisasi budaya akibat pengaruh media sosial, meskipun di sisi lain juga memberikan peluang untuk pelestarian budaya melalui digitalisasi dan promosi budaya lokal di platform digital, sehingga tantangan tetap ada dalam mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional yang berbasis kolektivisme mengingat pengaruh budaya global yang lebih dominan.

Di sisi lain, ketika platform digital dimanfaatkan secara sengaja untuk konten budaya lokal, ia dapat berfungsi sebagai sarana revitalisasi yang efektif. Kreator muda memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda karena mereka lebih memahami kesukaan generasi muda saat ini, seperti penggunaan bahasa yang sederhana, santai, mudah dipahami, serta bahasa gaul yang populer, sehingga dengan melibatkan kreator muda, pesan tentang budaya lokal dapat tersampaikan dengan lebih efektif. (Fahira, 2023)

Sintesis dari ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong dan penghambat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal tidak berdiri secara independen, melainkan saling berkaitan dalam sebuah ekosistem. Masyarakat cenderung mengadopsi gaya hidup, pakaian, dan preferensi konsumsi yang berasal dari budaya luar, mengakibatkan penurunan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya dan tradisi sendiri, sehingga dalam menghadapi ancaman kepunahan budaya dan tradisi lokal akibat globalisasi, penting untuk membangun kembali identitas lokal melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa bukan faktor tunggal, melainkan interaksi antara faktor individual, institusional, dan teknologis yang menentukan apakah generasi muda akan berperan sebagai agen pelestarian atau justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap erosi budaya. (Maulana et al., 2022)

Tabel 2. Sintesis Faktor Pendorong dan Penghambat Keterlibatan Generasi Muda dalam Pelestarian Budaya Lokal

| Dimensi | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Solusi |
|---|---|---|---|
| Indivudual Psikologis | Rasa kepemilikan dan keterikatan emosional terhadap budaya asal; kebanggaan terhadap identitas lokal | Lemahnya keterikatan emosional akibat mobilitas geografis dan minimnya pengalaman langsung dengan budaya asal; preferensi terhadap budaya populer global yang dianggap lebih modern dan relevan | Membangun keterikatan emosional melalui pengalaman langsung bersama tokoh adat, serta reframing narasi budaya lokal sebagai identitas yang relevan dan dapat dipadukan dengan gaya hidup modern |
| Sosial Intitusional | Pendidikan berbasis kearifan lokal dan multikultural; dukungan keluarga, tokoh adat, dan guru; kebijakan kurikulum berbasis budaya daerah | Implementasi kebijakan pelestarian budaya yang belum maksimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan evaluasi program yang lemah; rendahnya inovasi dalam penyajian budaya sehingga kurang menarik bagi generasi muda | Memperkuat sinergi pendanaan lintas sektor (pemerintah, sekolah, komunitas) serta mengemas kegiatan budaya dalam format partisipatif dan kekinian, seperti kompetisi atau program magang budaya bersertifikat |
| Teknologis-Media | Pemanfaatan platform digital untuk dokumentasi dan promosi budaya; peran kreator muda sebagai jembatan antara budaya lokal dan audiens digital | Dominasi konten budaya global di platform digital yang menyebabkan homogenisasi; risiko komodifikasi dan penyederhanaan makna budaya saat dikemas dalam format digital | Pelatihan kreator konten budaya lokal yang berkolaborasi dengan tokoh adat untuk menjaga keaslian, serta dukungan eksposur algoritmik bagi konten budaya lokal |

Sumber: Kajian Literatur, 2024 (diolah).

**Model Strategi Pelestarian Budaya Lokal Berbasis Generasi Muda yang Integratif**

Sub-pembahasan ketiga ini merumuskan model strategi pelestarian budaya lokal berbasis generasi muda yang disintesiskan dari berbagai rekomendasi yang muncul dalam literatur yang dikaji. Sintesis ini penting dilakukan karena, sebagaimana ditemukan dalam tinjauan literatur, kajian-kajian mengenai pelestarian budaya lokal masih cenderung terfragmentasi, baik dari segi pendekatan maupun fokus analisis, di mana sebagian penelitian menekankan aspek pendidikan, sementara yang lain berfokus pada kebijakan atau komunitas budaya, sehingga diperlukan kajian yang mensintesis berbagai perspektif tersebut secara komprehensif. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengusulkan model tiga pilar yang saling terintegrasi, yaitu pilar pendidikan karakter budaya, pilar pemberdayaan komunitas lokal, dan pilar literasi digital budaya.

Pilar pertama, pendidikan karakter budaya, menempati posisi sebagai fondasi dari seluruh model karena pendidikan merupakan saluran utama transmisi nilai antar generasi. Berbagai wadah seperti sanggar seni, komunitas budaya, dan program pelatihan berbasis masyarakat berfungsi sebagai komponen pelengkap yang vital dalam ekosistem pendidikan budaya, di mana aktivitas konkret seperti pelatihan seni tari tradisional, workshop kerajinan tangan, pembelajaran instrumen gamelan, serta partisipasi dalam festival budaya daerah memberikan pengalaman belajar yang bersifat langsung bagi peserta didik, dan pendidikan berbasis komunitas semacam ini menciptakan ruang interaksi langsung antara generasi muda dengan para pemangku budaya, meliputi seniman tradisional, empu tari, dan tetua adat. Pada tingkat kebijakan, dukungan terhadap pilar ini juga telah mulai terlihat. Di tingkat kebijakan, Kemendikbudristek telah mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal, dan kebijakan ini memungkinkan setiap daerah untuk merancang program pembelajaran yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan budaya lokal masing-masing. (Dewi et al., 2023)

Pilar kedua, pemberdayaan komunitas lokal, berfungsi sebagai ruang praktik yang menjembatani pengetahuan budaya yang diperoleh melalui pendidikan dengan pengalaman langsung dalam aktivitas budaya nyata. Komunitas lokal, baik yang berbasis adat, seni, maupun kepemudaan, memiliki peran strategis dalam

menyediakan wadah bagi generasi muda untuk mempraktikkan dan mengembangkan kapasitas budaya mereka. Melalui serangkaian pelatihan keterampilan, pendampingan partisipatif, dan inisiatif digital seperti dokumentasi budaya melalui platform multimedia, generasi muda diajak untuk menjadi kurator aktif kebudayaan mereka sendiri, dan kegiatan sosial kolaboratif seperti festival budaya, kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk integrasi budaya lokal ke kurikulum, serta program magang pemuda adat dengan lembaga pendukung menjadi bagian penting dari pemberdayaan ini. Pendekatan komunikasi partisipatif juga terbukti efektif dalam memperkuat pilar ini. Program-program yang melibatkan komunikasi partisipatif dapat dijadikan sebagai model dalam penguatan identitas budaya melalui keterlibatan pemuda secara aktif, di mana Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau dan beragam suku serta budaya menghadapi risiko kehilangan identitas budaya asli, sehingga upaya pelestarian dan peremajaan nilai-nilai budaya tetaplah penting sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan global. (Wulandari, 2024)

Pilar ketiga, literasi digital budaya, merupakan pilar yang relatif baru namun memiliki daya jangkau dan potensi dampak yang sangat besar mengingat tingkat penggunaan media digital yang sangat tinggi di kalangan generasi muda. Pilar ini berfungsi sebagai pengganda (multiplier) yang memperluas dampak dari dua pilar sebelumnya ke audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu tantangan besar di era globalisasi, dan untuk menjawab tantangan ini, teknologi digital, khususnya platform media sosial seperti TikTok, dapat dimanfaatkan sebagai media inovatif untuk mempromosikan, mengenalkan, dan melestarikan kekayaan budaya lokal, di mana format video pendek yang interaktif dan menarik memberikan peluang besar bagi individu dan komunitas untuk menampilkan budaya lokal secara kreatif dan mudah diakses, bahkan memungkinkan budaya lokal untuk dikenal di tingkat internasional. Pemanfaatan pilar ini juga membawa dampak psikologis positif bagi generasi muda itu sendiri. Generasi muda dapat menjadi lebih bangga akan warisan budaya mereka setelah melihat apresiasi dari audiens yang lebih luas, dan konten budaya yang dikemas dengan baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pariwisata, penjualan kerajinan, dan promosi produk lokal, sekaligus menggabungkan elemen hiburan dengan pendidikan sehingga proses pelestarian budaya menjadi lebih menyenangkan dan mudah diterima.

Meskipun ketiga pilar tersebut menawarkan potensi besar, kajian literatur juga mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi, khususnya pada pilar literasi digital budaya. Digitalisasi budaya membawa tantangan seperti komodifikasi, penyederhanaan makna, dan risiko hilangnya konteks asli tradisi, sehingga representasi budaya lokal dalam format konten digital oleh pelaku budaya muda perlu dikemas secara hati-hati agar tidak mengorbankan keaslian dan kedalaman makna budaya itu sendiri. Oleh karena itu, model tiga pilar yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya keterhubungan antar pilar: pendidikan karakter budaya memberikan landasan pengetahuan dan apresiasi yang mendalam, pemberdayaan komunitas lokal menyediakan ruang praktik yang otentik dan terbimbing, sementara literasi digital budaya berfungsi sebagai kanal penyebarluasan yang harus selalu berakar pada pemahaman dan pengalaman otentik yang diperoleh dari dua pilar sebelumnya, bukan sekadar trend-following tanpa substansi. (Siliutina et al., 2024)

Secara keseluruhan, hasil kajian terhadap ketiga sub-pembahasan ini mengonfirmasi argumen dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yaitu bahwa generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen pelestarian budaya lokal, namun potensi tersebut hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh ekosistem yang kondusif dan terintegrasi. Generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk melestarikan budaya asli Indonesia melalui berbagai cara, seperti memperkaya literasi budaya, bergabung dengan komunitas budaya, menjadi konten kreator, mempromosikan produk lokal, dan menginisiasi kegiatan budaya, sehingga generasi muda dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menjaga keunikan dan kekayaan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Tanpa intervensi yang terstruktur pada ketiga pilar tersebut, kecenderungan yang teridentifikasi dalam berbagai literatur yaitu pergeseran preferensi generasi muda dari budaya lokal menuju budaya populer global, kemungkinan akan terus berlanjut dan berpotensi mengancam keberlangsungan keberagaman budaya Indonesia dalam jangka panjang.

## Simpulan

Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga tujuan utama, yaitu mengidentifikasi peran generasi muda dalam mempertahankan nilai budaya lokal di era globalisasi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka, serta merumuskan strategi pelestarian yang efektif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran generasi muda dalam konteks ini bersifat ganda dan saling bertolak belakang: mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap erosi identitas budaya akibat globalisasi, namun pada saat yang sama merupakan aktor dengan potensi adaptif tertinggi untuk merevitalisasi budaya lokal melalui kapasitas kreatif dan literasi digital yang mereka miliki. Dualitas ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang relevan bukan lagi "apakah generasi muda peduli pada budaya lokal", melainkan "kondisi ekosistem seperti apa yang dapat mengonversi kepedulian kognitif menjadi keterlibatan aktif yang berkelanjutan".

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pergeseran cara pandang terhadap hubungan generasi muda dan budaya lokal, dari kerangka dikotomis "tradisi versus modernitas" menuju kerangka ekosistemik yang memandang pendidikan karakter budaya, pemberdayaan komunitas lokal, dan literasi digital budaya sebagai tiga elemen yang saling bergantung. Implikasinya, intervensi pelestarian budaya yang hanya menyasar satu elemen — misalnya hanya menambah materi budaya dalam kurikulum tanpa menyediakan ruang praktik di komunitas, atau hanya mendorong digitalisasi tanpa pendampingan substansi budaya — cenderung tidak akan menghasilkan keterlibatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dan program pelestarian budaya perlu dirancang secara terpadu, bukan sebagai inisiatif yang berdiri sendiri-sendiri antar lembaga.

Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa media digital menempati posisi kunci yang ambivalen: ia dapat menjadi katalisator homogenisasi budaya, tetapi juga dapat menjadi instrumen revitalisasi yang paling berpotensi menjangkau generasi muda secara luas, asalkan dikelola dengan kehati-hatian agar tidak mengorbankan keaslian dan kedalaman makna budaya. Temuan ini membuka ruang pemikiran baru bahwa keberhasilan pelestarian budaya di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kebudayaan dalam "menjembatani" antara otoritas budaya tradisional (tokoh adat, empu, sesepuh) dengan aktor-aktor baru di ranah digital (kreator konten, influencer lokal), bukan dengan memosisikan kedua pihak tersebut secara berlawanan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Kajian ini bersifat kualitatif dan berbasis sintesis literatur serta studi kasus pada konteks daerah tertentu, sehingga generalisasi temuan ke konteks budaya lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh masing-masing pilar (pendidikan, komunitas, dan digital) terhadap tingkat keterlibatan generasi muda, sehingga belum dapat menentukan pilar mana yang memberikan dampak paling signifikan jika diterapkan secara terpisah maupun simultan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif guna menguji model tiga pilar yang diusulkan dalam penelitian ini melalui pendekatan mixed-methods atau structural equation modeling (SEM), sehingga dapat diketahui bobot kontribusi masing-masing pilar terhadap keterlibatan generasi muda secara empiris. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna memantau perubahan pola keterlibatan generasi muda dalam jangka waktu yang lebih panjang, mengingat dinamika budaya digital berubah dengan sangat cepat. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan dengan membandingkan efektivitas model pelestarian budaya antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok generasi muda yang tinggal di daerah asal dengan yang bermigrasi ke kota besar, mengingat penelitian ini menemukan bahwa mobilitas geografis berkontribusi pada melemahnya keterikatan emosional terhadap budaya lokal.

Sebagai penutup, saat ini sejumlah inisiatif yang relevan dengan temuan penelitian ini telah mulai berjalan di lapangan, seperti program integrasi kearifan lokal dalam kurikulum merdeka oleh Kemendikbudristek, tumbuhnya komunitas kreator konten budaya berbasis bahasa daerah di berbagai platform media sosial, serta inisiatif digitalisasi arsip budaya oleh sejumlah lembaga kebudayaan daerah. Keberadaan inisiatif-inisiatif tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan: peluang karena ketiga pilar yang diusulkan dalam penelitian ini sesungguhnya sudah memiliki titik tumbuh di lapangan, namun juga tantangan karena inisiatif-inisiatif tersebut masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu kerangka strategi yang koheren. Penelitian-penelitian mendatang yang dapat memetakan, mengevaluasi, dan menghubungkan inisiatif-inisiatif yang sedang berjalan tersebut ke dalam model yang lebih sistemik akan memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik bagi pengembangan akademik di bidang kajian budaya dan pendidikan, maupun bagi praktik kebijakan pelestarian budaya lokal di Indonesia secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka


Abdullah, Asshididdiqi, A. D., & dll. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Indonesia Serta Tantangan Dalam Mempertahankan Rasa Nasionalisme. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(10), 6866–6871.

BALA, A. V. (2024). Digital Media and Cultural Identity: Exploring Intersections, Impacts, and Challenges. *Gusau Journal of Sociology*, *4*(3), 305–317. https://doi.org/10.57233/gujos.v4i3.17

Dalle, A., Amir, J., Mahande, R. D., & Burhamzah, M. (2024). *Jurnal Salsa*. *4*(2), 54–60.

Dewi, A. A., Annisa, D., Hidayati, N., Eka, D., & Puspita, M. (2023). Degradasi Karakter Pemuda Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Indigenous Knowledge*, *2*(4), 332–338.

Fahira, H. (2023). Budaya Sekitar Bagi Peserta Didik. *Joumi*, *1*(3), 2.

Jati, D. H. P., Listiarum, F., Aprilia, H., & Oktovian, A. U. T. (2025). Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Nasionalisme Dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *8*(2), 14–25. https://doi.org/10.37329/cetta.v8i2.4043

Julianty, A. A., Dewi, D. A., & Furi, Y. (2021). *Ansformasi Etno-Musik Tradisional Sasak; Evolusi Budaya Dan Pertentangan Kelas Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat Ini*. *1*(2), 1.

Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Globalisasi terhadap Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *3*(3), 256–263. https://doi.org/10.36312/jisip.v3i3.987

Manara, R., & Weber, M. (2023). Cultural Identity in the Digital Age: Navigating Globalization in Local Communities. *Journal of Humanities and Social Sciences (JHASS)*, *5*(3), 114–120. https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0503.451

Maulana, M., Muhammad, M., & Ulfa, M. (2022). Pemanfaatan Media Sosial dalam Upaya Pelestarian Kearifan Budaya Lokal di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, *1*(2), 62–65. https://doi.org/10.29303/jpimi.v1i2.1488

Nafis, M., Tambunan, J. S., & Ramadhan, S. A. P. (2025). *Pemuda Dalam Melestarikan Budaya Lokal Menghadapi Peran Globalisasi dan Modernisasi Youth in Preserving Local Culture Facing the Role of Globalization and Modernization*. (November).

Nahawan, R. S. (2025). Krisis Identitas Generasi Muda Indonesia. *Kompasiana.Com*, *3*, 1893–1900. https://www.kompasiana.com/bambangnurdiansyah6878/685e1468c925c40a886785c2/krisis-identitas-generasi-muda-indonesia

Nurul Kamaly, Dini Rifani, A. S. (2025). Sosietas : Jurnal Sosietas : Jurnal. *Jurnal Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83420

S. Nita Amalia, Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, *2*(3), 1–16. https://doi.org/10.47134/pssh.v2i3.297

Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, *2*(2), 76–84. https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842

Siliutina, I., Tytar, O., Barbash, M., Petrenko, N., & Yepyk, L. (2024). Cultural preservation and digital heritage: challenges and opportunities. *Revista Amazonia Investiga*, *14*(75), 262–273. https://doi.org/10.34069/ai/2024.75.03.22

Sinambela, L., Hendrarini, D., & Marpaung, A. H. (2024). Penguatan Identitas Budaya Pada Pemuda Indonesia Melalui Komunikasi Partisipatif Program Perintis Ngo IBEKA ketidakstabilan akibat memudarnya identitas nasional atau karakter khas suatu bangsa ,. *Jurnal Communicology*, *12*(2), 273–286.

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). The Concepts of Population and Sampling as well as Participant Selection in the Context of Educational Scientific Research. *Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 24–36.

Triyana, A. (2025). Tradisi yang memudar : menyikapi hilangnya nilai budaya di kalangan generasi muda. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *3*(Mei), 202–206.

Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *9*(1), 20–34. https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489

Zoya, R. A., Ramadon, R., & Noviarita, H. (2024). PT. Media Akademik Publisher DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP BUDAYA LOKAL DI INDONESIA Oleh. *Jma)*, *2*(12), 3031–5220.

# Lansia Terlupakan Jebakan Kemiskinan, Kekerasan, Dan Isolasi Di Masa Tua (Kota Makassar)

Nur Inaya Syam[1], , Usman Noer[2], Dwi Putri Septiani[3],
Musdalifah[4], M. Ishak Saputra[5]
[1] *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar, Indonesia.*
nurinaya768@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id,

**Abstrak:** Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menghadirkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis isu utama yang dihadapi lansia, meliputi kemiskinan, penelantaran, kekerasan, isolasi sosial, dan masalah kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan lansia merupakan kondisi struktural yang terbentuk sepanjang siklus hidup akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan perlindungan sosial. Penelantaran dan kekerasan terhadap lansia cenderung meningkat seiring perubahan struktur keluarga dan lemahnya sistem perlindungan negara, sementara isolasi sosial terbukti berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental. Selain itu, tingginya prevalensi penyakit kronis dan multimorbiditas menunjukkan bahwa masalah kesehatan lansia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terintegrasi melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengembangan layanan berbasis komunitas, serta peningkatan peran berbagai pihak dalam menjamin kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.

***Kata kunci:*** *Lansia, kemiskinan, penelantaran, kekerasan, isolasi sosial, kesehatan lansia.*

# Elderly Left Behind: The Traps Of Poverty, Violence, And Isolation In Old Age (Makassar City)

Nur Inaya Syam[1], , Usman Noer[2], Dwi Putri Septiani[3],
Musdalifah[4], M. Ishak Saputra[5]
[1]*Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*
nurinaya768@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id,

***Abstract:*** *The increasing number of elderly population in Indonesia presents various complex and multidimensional social problems. This study aims to analyze the main issues faced by the elderly, including poverty, neglect, violence, social isolation, and health problems. The analysis results show that elderly poverty is a structural condition formed throughout the life cycle due to limited access to education, formal employment, and social protection. Neglect and violence against the elderly tend to increase along with changes in family structure and the weakness of the state protection system, while social isolation has been shown to have a significant impact on physical and mental health. In addition, the high prevalence of chronic diseases and multimorbidity indicates that elderly health issues require a comprehensive approach. Therefore, integrated interventions are needed through strengthening the social protection system, developing community-based services, and increasing the role of various parties in ensuring the sustainable welfare of the elderly.*

***Keywords:*** *Elderly, poverty, neglect, violence, social isolation, elderly health.*

## Pendahuluan

Bagian Di Indonesia, kelompok lanjut usia (lansia) masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius akibat kerentanan ekonomi dan sosial yang mereka alami. Secara nasional, proporsi lansia yang berada dalam kelompok pengeluaran 40 persen terbawah tergolong tinggi, bahkan mendominasi di beberapa wilayah seperti Makassar, lansia sering terlupakan dalam jebakan kemiskinan dengan tingkat kemiskinan kota mencapai 4,97 persen pada 2024 (turun dari 5,07 persen tahun sebelumnya), di mana 31.356 KK tergolong fakir miskin dan lansia terlantar mencapai 71 orang. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan pada bantuan sosial yang birokratis, seperti kasus nenek Wahbah (85 tahun) yang harus digotong warga menggunakan bentor ke kelurahan demi sembako karena larangan wakil.(Karuwisi & Makassar, 2025)

Kerentanan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan lansia, dengan rata-rata lama sekolah hanya sekitar 3,6 tahun secara nasional, sehingga membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang lebih layak. Akibatnya, sebagian besar lansia bergantung pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan pendapatan tetap maupun perlindungan kerja yang memadai. Bahkan, hampir separuh lansia masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya meskipun kondisi fisik sudah menurun. Di sisi lain, akses terhadap program perlindungan sosial juga masih sangat terbatas, di mana hanya sekitar 2 persen lansia yang menerima bantuan nonkontributif, sementara program berbasis kontribusi seperti pensiun hanya menjangkau sekitar 12 persen dari total populasi lansia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia masih belum optimal dalam menjamin kesejahteraan mereka.

Selain persoalan kemiskinan, kekerasan terhadap lansia juga menjadi masalah serius yang memperburuk kualitas hidup mereka di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LBH APIK pada periode 2019–2020, kasus penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan, dengan 32 kasus yang tercatat, diikuti oleh kekerasan psikologis dan fisik. Pada tahun 2025, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan mencapai 0,79 persen, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dengan persentase 0,87 persen, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan psikologis sebesar 11,6 persen dan pengabaian sebesar 4,2 persen. Ironisnya, banyak kasus kekerasan terhadap lansia terjadi dalam lingkup keluarga sendiri, namun sering kali tidak terungkap karena dianggap sebagai urusan privat, sehingga menyebabkan tingginya angka *underreported* atau kasus yang tidak dilaporkan.(Sekunder, n.d.)

Di sisi lain, isolasi sosial menjadi faktor yang semakin memperparah kondisi lansia, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat. Urbanisasi, keterbatasan mobilitas, penurunan kondisi kesehatan, serta gaya hidup masyarakat modern yang cenderung individualistis membuat lansia semakin terpinggirkan dari lingkungan sosialnya. Dampak dari isolasi ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis dan kesehatan, seperti meningkatnya rasa kesepian, depresi, hingga risiko penyakit kronis dan gangguan kognitif.

Banyak lansia yang akhirnya menarik diri dari kehidupan sosial, mengalami minimnya interaksi, serta merasa tidak lagi memiliki peran dalam masyarakat. Kondisi ini lebih terasa di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses layanan sosial, serta semakin memburuk pada masa pandemi, di mana pembatasan sosial justru memperbesar jarak antara lansia dengan lingkungan sekitarnya dan meningkatkan tingkat stres serta keterasingan.(Amalia, 2015)

## Tinjauan Pustaka

Bagian Pendekatan menyeluruh dalam melihat kondisi lansia memandang mereka sebagai individu yang utuh, mencakup aspek ekonomi, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi lansia, seperti kemiskinan, kekerasan, dan isolasi sosial, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perspektif kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta dukungan sosial yang memadai. Dengan demikian, lansia tidak hanya dipandang dari sisi keterbatasannya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi dan hak untuk hidup sejahtera di masa tua.

Dalam memahami permasalahan lansia, terdapat beberapa konsep dan teori yang menjadi rujukan utama. Teori penuaan (aging theory), seperti teori disengagement menjelaskan bahwa lansia cenderung menarik diri dari kehidupan sosial seiring bertambahnya usia, sedangkan teori aktivitas menekankan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, teori ketergantungan sosial menunjukkan bahwa lansia sering kali berada dalam posisi rentan akibat menurunnya kemampuan ekonomi dan meningkatnya ketergantungan pada keluarga atau lingkungan sekitar. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menjebak lansia dalam kondisi rentan, terutama ketika mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan sosial yang memadai.

Selain kemiskinan, kekerasan terhadap lansia juga menjadi bagian penting dalam kajian literatur. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi yang sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga. Kondisi ini diperparah oleh anggapan bahwa masalah dalam keluarga merupakan ranah privat, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Di sisi lain, isolasi

sosial juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi lansia, yang disebabkan oleh berkurangnya interaksi sosial, kehilangan peran dalam masyarakat, serta keterbatasan mobilitas dan kesehatan. Dampak dari isolasi ini meliputi kesepian, depresi, hingga penurunan kesehatan fisik dan kognitif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi lansia merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh untuk memahami dan menangani permasalahan kemiskinan, kekerasan, dan isolasi yang mereka alami di masa tua.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena lansia terlupakan yang terjebak dalam kemiskinan, kekerasan, dan isolasi sosial berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam keterkaitan antara berbagai permasalahan yang dihadapi lansia serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks sosial di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia, kemiskinan, kekerasan, dan isolasi sosial. Literatur yang digunakan merupakan sumber yang memiliki kredibilitas akademik dan dapat diakses secara daring maupun luring. Data yang dikumpulkan mencerminkan berbagai perspektif teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lansia dalam berbagai aspek kehidupan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis dengan cara menginterpretasikan, membandingkan, serta menghubungkan berbagai teori dan temuan penelitian yang ada. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai fenomena lansia terlupakan dalam jebakan kemiskinan, kekerasan, dan isolasi sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi dasar dalam merumuskan upaya peningkatan kesejahteraan lansia secara lebih efektif.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Kemiskinan Pada Lansia

Kemiskinan pada lansia merupakan masalah serius di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Makassar, di mana jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat seiring pergeseran struktur demografi menuju era *super-aging*. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak lansia yang terjebak dalam kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, dominasi pekerjaan di sektor informal, serta terbatasnya akses terhadap jaminan sosial. Akibatnya, banyak lansia masih harus bekerja hingga usia lanjut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Makassar, tingkat kemiskinan kota sekitar 4,97 persen pada tahun 2024 mencerminkan adanya ribuan lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan sosial yang jumlahnya masih terbatas.

Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan pada lansia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga kondisi kesehatan dan perubahan sosial dalam keluarga. Penurunan kesehatan fisik serta meningkatnya biaya pengobatan menjadi beban yang signifikan bagi lansia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang memadai. Selain itu, ketergantungan pada keluarga semakin melemah akibat urbanisasi dan migrasi generasi muda, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan ekonomi maupun sosial bagi lansia. Fenomena ini juga terlihat di DI Yogyakarta, di mana tingkat kemiskinan multidimensi lansia mencapai 16,47 persen, yang dipengaruhi oleh faktor seperti jenis kelamin, status perkawinan, serta gangguan fungsional. Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Makassar, di mana lansia perempuan cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan karena memiliki harapan hidup lebih panjang, tingkat pendidikan yang lebih rendah, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.(Werdha & Usia, 2018)

Di Makassar, kemiskinan lansia semakin diperburuk oleh sistem birokrasi bantuan sosial yang masih rumit dan kurang ramah terhadap kondisi fisik mereka. Dalam beberapa kasus, lansia yang sedang sakit tetap harus datang sendiri untuk mendapatkan bantuan seperti sembako, yang mencerminkan adanya pengabaian secara sistemik dalam pelayanan sosial. Data menunjukkan terdapat puluhan lansia terlantar yang bergantung pada program dari Dinas Sosial, namun upaya peningkatan kesejahteraan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal aksesibilitas dan distribusi bantuan. Kondisi ini menyebabkan lansia terjebak dalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana mereka tetap harus bekerja di sektor informal yang berisiko tinggi meskipun kondisi fisik sudah tidak mendukung.

Dampak kemiskinan yang dialami lansia tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah pada dimensi sosial dan psikologis. Banyak lansia mengalami isolasi sosial, perasaan kesepian, hingga depresi yang secara tidak langsung mempercepat penurunan kualitas hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat keterbatasan pendidikan menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini di masyarakat urban Makassar. Selain itu, faktor kultural seperti sikap pasrah terhadap keadaan juga turut memperkuat kondisi kerentanan lansia. Jika tidak ada intervensi yang tepat dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, maka permasalahan ini berpotensi mengancam stabilitas sosial di wilayah perkotaan, khususnya di Makassar.(Wahyuni, 2020)

**Penelantaran Lansia**

Penelantaran lansia di Makassar merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks, yang tidak terlepas dari peran lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyediaan fasilitas seperti Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC), yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar, meliputi makanan, pakaian, serta layanan rehabilitasi sosial.

Dalam kajian literatur, lansia terlantar didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki keluarga atau tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak lain, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh kemiskinan yang berkepanjangan serta minimnya perhatian dan dukungan dari keluarga, yang seharusnya menjadi lingkungan utama dalam pemenuhan kesejahteraan lansia.

Faktor penyebab penelantaran lansia di wilayah urban seperti Makassar tidak hanya berasal dari keterbatasan ekonomi, tetapi juga dari perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern. Beban ekonomi keluarga yang semakin tinggi sering kali membuat lansia dipandang sebagai tanggungan, sehingga perhatian terhadap mereka berkurang. Selain itu, pergeseran nilai dari yang sebelumnya kolektif menjadi lebih individualistis turut memperparah kondisi ini. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan secara fasilitatif melalui berbagai program seperti bimbingan sosial, kegiatan senam lansia, hingga tindak lanjut pasca-perawatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, lansia yang mengalami penelantaran tetap menghadapi berbagai dampak serius terhadap kualitas hidup, seperti penurunan kondisi gizi, meningkatnya stres, serta depresi akibat kesepian dan kurangnya interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia lembaga kesejahteraan sosial, kebutuhan emosional dan sosial lansia sering kali belum terpenuhi secara optimal.(Dahlan et al., 2025)

Dampak penelantaran lansia di Makassar sangat signifikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup. Keterbatasan anggaran pada lembaga sosial, minimnya tenaga medis tetap, serta kurangnya sarana rekreasi menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi lansia terlantar. Kondisi ini menyebabkan banyak lansia mengalami masalah kesehatan fisik dan psikologis secara berkepanjangan, seperti penurunan kondisi tubuh, stres, hingga depresi akibat kurangnya perhatian dan aktivitas sosial. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya rehabilitasi oleh Dinas Sosial, efektivitasnya masih tergolong terbatas karena belum mampu secara menyeluruh menurunkan angka keterlantaran lansia di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, upaya penanganan penelantaran lansia memerlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan program dari Dinas Sosial menjadi sangat penting, terutama dalam hal peningkatan anggaran, penyediaan sumber daya manusia yang memadai, serta perbaikan fasilitas pelayanan sosial.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengatasi berbagai faktor penghambat yang ada. Pendekatan holistik juga perlu diterapkan, dengan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial lansia. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup lansia terlantar dapat meningkat dan mereka dapat menjalani masa tua dengan lebih layak dan bermartabat.(Makassar, n.d.)

**Kekerasan Terhadap Lansia**

Kekerasan terhadap lansia di Makassar mencakup bentuk fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual, sering terjadi dalam keluarga atau komunitas akibat stres pengasuh, isolasi sosial, dan ketergantungan finansial. Kasus ekstrem seperti pembunuhan lansia di Jalan Toddopuli karena utang Rp7 juta oleh pelaku mahasiswa menunjukkan motif ekonomi, sementara percobaan pemerkosaan di Gowa mencerminkan kerentanan lansia perempuan. Secara nasional, kekerasan lansia underreported karena stigma privasi keluarga.

Faktor risiko utama meliputi kerapuhan fisik lansia, demensia, kesulitan komunikasi, serta pelaku dengan riwayat kekerasan, penyalahgunaan zat, atau beban ekonomi tinggi. Di Indonesia, kekerasan fisik dominan pada lansia korban KDRT, dengan dampak fatal akibat pemulihan lambat, di mana lansia berhak atas perlindungan sementara, kesehatan, dan pendampingan per UU PKDRT. Rendahnya dukungan sosial dan ketergantungan fungsional memperburuk risiko.(Indonesia et al., 2017).

Dampak kekerasan sangat destruktif, menyebabkan cedera fisik permanen, depresi, PTSD, dan penurunan kualitas hidup, terutama pada lansia terisolasi yang sulit melapor. Lansia perempuan menghadapi KBG tambahan seperti marjinalisasi dan penelantaran, dengan Permen PPPA No. 24/2010 sebagai upaya perlindungan gender-responsif. Di Makassar, kasus hipnotis lansia pasca-bank menambah ancaman kejahatan terstruktur.

Upaya pencegahan memerlukan penegakan hukum (penangkapan, perintah pembatasan), tempat tinggal alternatif seperti panti jompo, dan layanan dukungan makanan-transportasi untuk kurangi isolasi. Pendekatan holistik melalui edukasi keluarga, pelatihan caregiver, dan koordinasi Dinsos-Polri di Makassar dapat meminimalkan faktor risiko.

**Isolasi Sosial Pada Lansia**

Isolasi sosial pada lansia di Makassar ditandai dengan keterbatasan interaksi sosial yang menyebabkan kesepian, dengan studi menunjukkan kesepian sedang (39,8 persen) dan berat (33,7 persen) pada lansia di Puskesmas Karuwisi, berkorelasi negatif dengan kualitas hidup (r = -0,286). Faktor pemicu meliputi urbanisasi, migrasi anak muda, dan penurunan mobilitas fisik, di mana dukungan sosial rata-rata 3,44 justru berhubungan positif dengan kualitas hidup (r = 0,269). Lansia perempuan (66,5 persen responden) lebih rentan akibat beban rumah tangga dan kurangnya jaringan sosial.

enelitian di Makassar dengan 200 partisipan (usia rata-rata 60,7 tahun) menemukan kesepian rata-rata 3,08 memengaruhi kualitas hidup secara negatif, terutama pada etnis Bugis-Makassar yang mendominasi. Isolasi bersifat subjektif, berbeda dari kesepian objektif, dan diperburuk oleh akses terbatas ke teknologi digital di masyarakat satu dimensi. Hal ini menyebabkan lansia menarik diri, kurang partisipasi komunitas, dan ketergantungan emosional.(Daud & Siswanti, 2023)

Dampak isolasi sosial termasuk risiko depresi, gangguan kognitif, dan penyakit kardiovaskular independen dari faktor genetik, dengan lansia terisolasi mengalami penurunan psychological well-being signifikan akibat loneliness dan isolasi secara simultan. Di Makassar, kurangnya kontak sosial mempercepat stres kronis, terutama pasca-pandemi, di mana 60 persen lansia studi pendahuluan menunjukkan gejala menarik diri.

Upaya pencegahan memerlukan peran keluarga dalam mendorong interaksi, program komunitas seperti senam lansia, dan fasilitas Senior Activity Center untuk sosialisasi berbasis environmental psychology. Integrasi dukungan sosial di tingkat puskesmas Makassar dapat meningkatkan self-efficacy dan mengurangi kesepian secara holistik.

**Masalah Kesehatan Pada Lansia**

Masalah kesehatan pada lansia di Makassar didominasi penyakit tidak menular seperti hipertensi (57,6 persen), artritis (51,9 persen), stroke (46,1 persen), serta diabetes mellitus (4,8 persen) berdasarkan Riskesdas 2019, dengan prevalensi tinggi di wilayah seperti Puskesmas Antara dan Sudiang Raya yang memiliki 4.165 lansia. Hipertensi paling umum pada lansia perempuan (65 persen responden studi), usia 60-74 tahun (82,5 persen), dan tidak bekerja (92,5 persen), sering tidak terdeteksi hingga komplikasi serius.

Faktor risiko utama mencakup penuaan fisiologis, malnutrisi, obesitas, kurang aktivitas fisik, serta stres dari isolasi sosial yang memperburuk depresi dan kecemasan (14 persen kasus global). Di Makassar, atritis dominan pada perempuan pasca-menopause akibat faktor hormonal, dengan senam lansia di Puskesmas Tamalate efektif mengurangi gejala degeneratif sendi dan otot. Masalah gigi-mulut (19,1 persen) dan paru obstruktif (8,6 persen) turut menurunkan kualitas hidup.

Dampaknya meliputi penurunan mobilitas, ketergantungan caregiver, dan risiko jatuh-fraktur, di mana kesepian berkorelasi dengan kualitas hidup buruk (38,6 persen lansia studi Karuwisi). Lansia urban Makassar rentan inkontinensia (BAB/BAK), gangguan tidur, dan penyakit jantung koroner akibat pola makan tidak sehat dan urbanisasi.

Pencegahan melalui posyandu lansia rutin, edukasi gizi, senam, dan skrining dini di puskesmas efektif, dengan Dinkes Makassar mendukung poli khusus untuk deteksi hipertensi dan diabetes. Pendekatan holistik termasuk manajemen stres dan vaksinasi pencegah pneumonia/influenza krusial untuk kurangi beban kesehatan.(Bura et al., 2023)

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lansia di Makassar menghadapi permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan, meliputi kemiskinan, penelantaran, kekerasan, serta isolasi sosial yang berdampak pada penurunan kualitas hidup di masa tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lansia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, kesehatan, dan perubahan struktur keluarga akibat urbanisasi. Selain itu, kerentanan lansia, khususnya perempuan, semakin tinggi akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta jaminan sosial yang memadai, sehingga memperkuat siklus ketidakberdayaan di usia lanjut.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam menangani permasalahan lansia, dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Penguatan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sosial, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Selain itu, implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia perlu dioptimalkan agar perlindungan terhadap lansia dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan lansia yang lebih layak, sejahtera, dan bermartabat di masa tua.

## Daftar Pustaka


Amalia, A. D. (2015). Kesepian Dan Isolasi Sosial Yang Dialami Lanjut Usia: Tinjauan Dari Perspektif Sosiologis Loneliness And Social Isolation Experienced By The Elderly: A Sociological Perspective Review Ayu Diah Amalia. 18(02), 203–210.

Bura, A. S. N., Mahmud, N. U., Epidemiologi, P., Masyarakat, F. K., Indonesia, U. M., & Penulis, E. (2023). Article history : 4(4), 678–689.

Dahlan, J. K. H. A., Tim, K. C., & Selatan, K. T. (2025). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pondok Berdikari Tangerang. 2.

Daud, M., & Siswanti, D. N. (2023). Dampak Dukungan Sosial dan Kesepian Terhadap Kualitas Hidup : Studi pada Lansia di Kota Makassar. 1867–1875.

Indonesia, J. K., Ilmu, F., & Universitas, K. (2017). Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia Pendahuluan Metode. 20(3), 168–175.

Karuwisi, P., & Makassar, K. (2025). No Title. 15(Crewdson 2015), 920–926.

Makassar, D. I. K. (n.d.). Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ( Lansia ) Terlantar. 5.

Saputri, Z., & Laeli, S. (2024). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah. Jurnal Karimah Tauhid, 3(8), 8474–8481.

Sekunder, A. D. (n.d.). Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial:

Wahyuni, W. (2020). Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. 57–67.

Werdha, T., & Usia, L. (2018). Desain Panti Sosial Tresna Werdha di Makassar. 5.

# DILEMA ETIK DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DI UPT DISABILITAS: KETEGANGAN ANTARA KETERBATASAN SUMBER DAYA ORGANISASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KLIEN

Sadira Sinta Agistya[1], Moch. Ilham Noer Sunan[2]
[1] *Program studi Pekerjaan Sosial, Program Magister Terapan, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia*
[2] *Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia..*
agistyadira18@gmail.com

**Abstrak:** Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan bidang praktik pekerjaan sosial yang sarat dengan kompleksitas etis, khususnya dalam konteks organisasi pelayanan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pekerja sosial kerap dihadapkan pada dilema etik ketika tuntutan pemenuhan kebutuhan klien berhadapan dengan keterbatasan anggaran, kebijakan organisasi, dan kapasitas layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Disabilitas. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai profesi pekerjaan sosial dan realitas struktural organisasi sebagai human service organization. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dilema etik pekerja sosial dalam praktik pelayanan disabilitas di UPT, dengan menekankan ketegangan antara keterbatasan sumber daya organisasi dan pemenuhan kebutuhan klien. Penulisan artikel menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis konseptual, dengan mengkaji kode etik International Federation of Social Workers (IFSW), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), serta literatur ilmiah terkait etika pekerjaan sosial dan organisasi pelayanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dilema etik dalam pelayanan disabilitas tidak semata-mata bersumber dari keputusan individual pekerja sosial, melainkan merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh desain kebijakan, tata kelola organisasi, dan distribusi sumber daya. Pekerja sosial berada dalam posisi rentan terhadap tekanan moral ketika nilai keadilan sosial dan kepentingan terbaik klien tidak sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kerangka kebijakan organisasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian etika pekerjaan sosial di Indonesia dengan menegaskan pentingnya pendekatan etik yang tidak hanya berfokus pada tanggung jawab individu, tetapi juga pada tanggung jawab organisasi dalam menciptakan praktik pelayanan yang adil, etis, dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas.

***Kata kunci:*** *Dilema etik: Pekerjaan Sosial; Disabilitas: Keterbatasan sumber daya: Organisasi pelayanan sosial.*

# ETHICAL DILEMMAS IN SOCIAL WORK PRACTICE AT DISABILITY SERVICE CENTERS: TENSIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL RESOURCE CONSTRAINTS AND MEETING CLIENTS NEEDS

Sadira Sinta Agistya[1], Moch. Ilham Noer Sunan[2]

[1] *Program studi Pekerjaan Sosial, Program Magister Terapan, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia*

[2] *Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia*

agistyadira18@gmail.com

***Abstract:*** *Social services for persons with disabilities constitute a field of social work practice fraught with ethical complexities, particularly within service organizations constrained by limited resources. Social workers frequently encounter ethical dilemmas when clients' needs conflict with budgetary restrictions, organizational policies, and service capacity within Technical Implementation Units (UPTs) for Disability Services. This situation generates tension between the core values of the social work profession and the structural realities of human service organizations. This article aims to analyze the ethical dilemmas faced by social workers in disability service practice at UPTs, emphasizing the tension between organizational resource limitations and the fulfillment of clients' needs. The study employs a qualitative approach through literature review and conceptual analysis, drawing on the ethical codes of the International Federation of Social Workers (IFSW) and the Indonesian Professional Social Workers Association (IPSPI), as well as scholarly literature on social work ethics and human service organizations. Findings indicate that ethical dilemmas in disability services are not merely the result of individual practitioners' decisions but are fundamentally structural issues shaped by policy design, organizational governance, and resource allocation. Social workers occupy a morally vulnerable position when core professional values such as social justice and the best interests of clients cannot be fully realized within existing organizational policy frameworks. This article contributes to the development of social work ethics discourse in Indonesia by underscoring the need for an ethical approach that extends beyond individual accountability to include organizational responsibility in creating equitable, ethical, and rights-based disability services.*

***Keywords:*** *Ethical dilemmas: social work: disability: resource constraints: human service organizations.*

## Pendahuluan

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang praktik pekerjaan sosial yang memiliki kompleksitas tinggi, baik ditinjau dari keragaman kebutuhan klien maupun dari tata kelola organisasi pelayanan sosial. Penyandang disabilitas kerap menghadapi hambatan multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, diskriminasi sosial, serta ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak sosial dan kesejahteraan (United Nations, 2016). Kondisi tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang memerlukan intervensi profesional berbasis nilai, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, pekerja sosial memiliki peran strategis sebagai profesi yang berkomitmen pada perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan keberfungsian sosial individu maupun kelompok rentan. International Federation of Social Workers (IFSW) menegaskan bahwa pekerjaan sosial berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat dan nilai manusia, pemajuan hak asasi manusia, serta keadilan sosial (IFSW, 2018). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif bagi pekerja sosial dalam merespons kebutuhan penyandang disabilitas secara profesional dan etis.

Di Indonesia, pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas banyak diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UPT Pelayanan Disabilitas berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial, pendampingan, serta pengembangan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Namun demikian, praktik pelayanan di tingkat UPT seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya organisasi, baik dalam bentuk anggaran, jumlah tenaga profesional, ketersediaan sarana prasarana, maupun dukungan kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan klien (Kementerian Sosial RI, 2020). Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada kualitas dan jangkauan layanan yang dapat diberikan.

Kondisi keterbatasan sumber daya organisasi tidak jarang berujung pada munculnya dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial. Dilema etik merujuk pada situasi ketika pekerja sosial dihadapkan pada dua atau lebih pilihan tindakan yang sama-sama memiliki dasar nilai profesional, namun tidak seluruhnya dapat

diwujudkan secara bersamaan (Banks, 2021). Di satu sisi, pekerja sosial terikat pada nilai-nilai profesi yang menekankan kepentingan terbaik klien (best interest of the client), keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di sisi lain, pekerja sosial juga merupakan bagian dari organisasi pelayanan yang memiliki aturan, target kinerja, serta batasan struktural tertentu sebagai Human Service Organization (HSO). Ketegangan antara tuntutan profesional dan realitas organisasi inilah yang menjadi sumber utama dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial di layanan disabilitas.

Berbagai kajian mengenai etika pekerjaan sosial telah banyak dikembangkan, baik dalam perspektif normatif maupun praktis. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan etika pada tataran individual pekerja sosial dan belum secara spesifik mengulas dilema etik dalam konteks pelayanan disabilitas di tingkat organisasi layanan, khususnya dalam konteks Indonesia. Padahal, dinamika praktik etis pekerja sosial sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, sistem pelayanan kesejahteraan sosial, serta kebijakan nasional yang mengatur penyelenggaraan layanan disabilitas (Gray & Webb, 2010; Reamer, 2019). Ketiadaan analisis yang kontekstual berpotensi mengaburkan kompleksitas dilema etik yang dihadapi pekerja sosial di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengisi celah kajian dengan menganalisis dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial di UPT Pelayanan Disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan ketegangan antara keterbatasan sumber daya organisasi dan pemenuhan kebutuhan klien. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori etika, nilai dan kode etik profesi pekerjaan sosial, serta konteks praktik pelayanan disabilitas di Indonesia. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk dilema etik yang muncul akibat keterbatasan sumber daya organisasi dalam pelayanan disabilitas; (2) menganalisis dilema tersebut berdasarkan nilai, prinsip, dan kode etik pekerjaan sosial; serta (3) merumuskan rekomendasi strategis bagi pekerja sosial dan organisasi layanan disabilitas dalam menghadapi dilema etik secara profesional dan bertanggung jawab.

## Metode

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis konseptual dengan fokus pada isu etika pekerjaan sosial dalam konteks pelayanan disabilitas (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penulisan tidak berorientasi pada pengukuran empiris, melainkan pada pendalaman pemahaman teoretis dan refleksi kritis terhadap dilema etik yang dihadapi pekerja sosial dalam praktik organisasi pelayanan (human service organization).

Sumber data dalam artikel ini berasal dari dokumen-dokumen normatif dan akademik yang relevan, meliputi kode etik pekerjaan sosial internasional dan nasional, yaitu Global Social Work Statement of Ethical Principles yang dikeluarkan oleh International Federation of Social Workers (IFSW) serta Kode Etik Pekerja Sosial Profesional Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Selain itu, artikel ini juga mengkaji literatur ilmiah berupa buku teks dan artikel jurnal internasional dan nasional yang membahas etika pekerjaan sosial, dilema etik dalam praktik profesional, organisasi pelayanan sosial, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis etik berbasis prinsip (principle-based ethical analysis), yang menitikberatkan pada pengkajian nilai inti pekerjaan sosial, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepentingan terbaik klien (Banks, 2021). Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dilema etik yang muncul akibat keterbatasan sumber daya organisasi, serta untuk menelaah ketegangan antara tuntutan profesional pekerja sosial dan kebijakan organisasi pelayanan disabilitas

Proses analisis dilakukan secara tematik dan reflektif, dengan mengaitkan norma etika dan prinsip profesional dengan konteks struktural pelayanan disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pendekatan reflektif digunakan untuk menafsirkan dilema etik sebagai persoalan yang tidak semata-mata bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kebijakan, tata kelola organisasi, dan sistem distribusi sumber daya (Castleberry & Nolen 2018). Dengan demikian, artikel ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial serta implikasinya bagi penguatan praktik etis di tingkat individu dan organisasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Keterbatasan Sumber Daya sebagai Pemicu Dilema Etik

Dalam praktik pelayanan disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT), keterbatasan sumber daya merupakan realitas struktural yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta jumlah tenaga profesional berdampak langsung pada cakupan dan kualitas layanan yang dapat diberikan kepada klien disabilitas. Kondisi ini menempatkan pekerja sosial dalam posisi yang rentan secara etis, karena mereka dihadapkan pada tuntutan profesional untuk memenuhi kebutuhan klien secara optimal, sementara kapasitas organisasi bersifat terbatas.

Situasi tersebut memunculkan dilema etik (ethical dilemma) ketika pekerja sosial menyadari bahwa tidak semua kebutuhan klien dapat dipenuhi secara bersamaan. Keputusan untuk memprioritaskan layanan bagi satu klien berpotensi mengurangi kesempatan klien lain untuk memperoleh layanan yang sama. Dalam perspektif etika pekerjaan sosial, kondisi ini menantang prinsip keadilan sosial (social justice) dan kesetaraan akses terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, yang merupakan nilai inti profesi (IFSW, 2018).

Banks (2021) menjelaskan bahwa dilema etik dalam pekerjaan sosial sering kali muncul bukan karena ketiadaan nilai, melainkan karena adanya konflik antara nilai-nilai yang sama-sama sah secara moral. Dalam konteks pelayanan disabilitas, konflik tersebut terlihat jelas antara komitmen terhadap pemenuhan hak klien dan keterbatasan struktural organisasi pelayanan. Dengan demikian, dilema etik yang dihadapi pekerja sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral individual, melainkan sebagai persoalan etika struktural dalam Human Service Organization (HSO).

Dilema ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan profesional dalam pelayanan disabilitas sering berlangsung dalam kerangka bounded ethical decision-making, yaitu pengambilan keputusan etis yang dibentuk dan dibatasi oleh kebijakan, sumber daya, serta sistem organisasi (Reamer, 2019). Pekerja sosial tidak selalu memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuai dengan penilaian profesionalnya, karena keputusan tersebut harus dinegosiasikan dengan realitas organisasi dan kebijakan pelayanan.

**Ketegangan antara Kepentingan Klien dan Tuntutan Organisasi**

Kode Etik International Federation of Social Workers (IFSW) dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) menegaskan bahwa kepentingan terbaik klien harus menjadi prioritas utama dalam praktik pekerjaan sosial. Prinsip penghormatan terhadap martabat dan nilai manusia menuntut pekerja sosial untuk merespons kebutuhan klien disabilitas secara manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak. Namun, dalam konteks organisasi pelayanan, pekerja sosial juga terikat pada kebijakan internal, prosedur administratif, serta target kinerja yang ditetapkan oleh lembaga.

Ketegangan antara kepentingan klien dan tuntutan organisasi sering memunculkan konflik nilai profesional, terutama ketika kebijakan organisasi membatasi fleksibilitas pekerja sosial dalam merancang dan melaksanakan intervensi. Hasenfeld (2010) menekankan bahwa organisasi pelayanan manusia pada dasarnya beroperasi dalam logika administratif dan birokratis, yang tidak selalu selaras dengan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar profesi pekerjaan sosial.

Misalnya, pembatasan jumlah penerima layanan, durasi pendampingan, atau jenis layanan yang dapat diberikan dapat bertentangan dengan kebutuhan aktual klien disabilitas yang memerlukan dukungan jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, pekerja sosial dihadapkan pada pilihan yang sama-sama memiliki implikasi etis, yaitu antara mempertahankan loyalitas terhadap organisasi atau memperjuangkan kepentingan klien secara lebih optimal.

Konflik ini menunjukkan bahwa dilema etik dalam pelayanan disabilitas tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga bersifat institusional. Gray dan Webb (2010) menyatakan bahwa etika pekerjaan sosial dalam HSO harus dipahami sebagai praktik kolektif yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kebijakan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, analisis dilema etik perlu melampaui pendekatan individual dan mempertimbangkan tanggung jawab etis organisasi secara lebih luas.

**Moral Distress sebagai Konsekuensi Praktik Etik dalam Keterbatasan**

Ketidakmampuan untuk sepenuhnya memenuhi tuntutan profesional dan organisasi secara simultan berpotensi menimbulkan tekanan moral (moral distress) pada pekerja sosial. Moral distress terjadi ketika pekerja sosial mengetahui tindakan yang secara etis paling tepat, namun tidak dapat melaksanakannya karena adanya hambatan struktural, kebijakan organisasi, atau keterbatasan sumber daya (Reamer, 2019).

Dalam konteks pelayanan disabilitas, moral distress dapat muncul ketika pekerja sosial menyadari bahwa klien membutuhkan layanan lanjutan, alat bantu tertentu, atau pendampingan intensif, tetapi organisasi tidak memiliki kapasitas untuk memenuhinya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa frustrasi, tetapi juga dapat berdampak pada kelelahan emosional dan penurunan kepuasan kerja pekerja sosial.

Banks dan Gallagher (2009) menegaskan bahwa moral distress yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada erosi integritas profesional dan menurunnya sensitivitas etik dalam praktik. Oleh karena itu, keberadaan dilema etik yang berulang tanpa mekanisme refleksi dan dukungan institusional berpotensi melemahkan kualitas pelayanan sosial secara keseluruhan.

Banks dan Gallagher (2009) menegaskan bahwa moral distress yang berlangsung secara berulang dan tidak direspons melalui mekanisme kelembagaan yang memadai berpotensi mengikis integritas profesional pekerja sosial. Dalam konteks organisasi pelayanan disabilitas, kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu pekerja sosial, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menyediakan ruang refleksi etik, dukungan supervisi, dan kebijakan yang sensitif terhadap kompleksitas kebutuhan klien. Moral distress yang dibiarkan tanpa intervensi struktural dapat mendorong normalisasi praktik-praktik kompromistis yang menjauh dari nilai inti pekerjaan sosial, sehingga melemahkan kualitas pelayanan dan tujuan kesejahteraan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan moral distress perlu dipahami sebagai tanggung jawab organisasi dan kebijakan pelayanan, bukan semata-mata sebagai persoalan ketahanan personal pekerja sosial.

**Peran Kode Etik sebagai Instrumen Navigasi Etik**

Dalam menghadapi dilema etik dan tekanan moral, kode etik profesi memiliki peran strategis sebagai instrumen navigasi etik bagi pekerja sosial. Kode Etik IFSW dan IPSPI tidak dimaksudkan sebagai seperangkat aturan kaku yang memberikan jawaban instan atas setiap situasi, melainkan sebagai kerangka reflektif untuk menimbang nilai, prinsip, dan konsekuensi dari tindakan profesional (IFSW, 2018).

Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, kode etik membantu pekerja sosial untuk tetap menjaga orientasi pada nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat klien. Selain itu, kode etik juga memberikan legitimasi profesional bagi pekerja sosial untuk melakukan advokasi, baik terhadap kebijakan internal organisasi maupun terhadap sistem pelayanan yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam mendorong perubahan praktik dan kebijakan yang lebih berkeadilan.

**Strategi Pengambilan Keputusan Etik dalam Konteks Human Service Organization**

Menghadapi dilema etik dalam kondisi keterbatasan sumber daya, pekerja sosial dituntut untuk mengembangkan strategi pengambilan keputusan yang sistematis, reflektif, dan berbasis nilai profesi. Analisis berbasis prinsip etika menjadi salah satu pendekatan yang relevan, dengan mempertimbangkan nilai inti pekerjaan sosial, ketentuan kode etik, serta dampak keputusan terhadap klien, organisasi, dan masyarakat luas (Banks, 2021).

Selain itu, mekanisme konsultasi profesional, supervisi etik, dan diskusi tim menjadi elemen penting dalam praktik etika di HSO. Gray dan Webb (2010) menekankan bahwa tanggung jawab etis tidak hanya berada pada individu pekerja sosial, tetapi juga pada organisasi dalam menciptakan lingkungan praktik yang mendukung pengambilan keputusan etis secara kolektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas etika organisasi menjadi prasyarat penting dalam mengelola dilema etik secara berkelanjutan.

Dalam situasi keterbatasan sumber daya, pekerja sosial tidak hanya dituntut untuk bertindak responsif terhadap kebutuhan klien, tetapi juga untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan etik yang sistematis, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Analisis berbasis prinsip etika (principle-based ethical analysis) menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks

ini, karena memungkinkan pekerja sosial untuk menimbang nilai inti pekerjaan sosial seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepentingan terbaik klien secara seimbang dengan ketentuan kode etik dan konsekuensi keputusan terhadap klien, organisasi, serta masyarakat luas (Banks, 2021). Pendekatan ini membantu pekerja sosial untuk menghindari pengambilan keputusan yang bersifat reaktif atau semata-mata administratif, serta menempatkan pertimbangan etik sebagai landasan utama praktik profesional.

Namun demikian, dalam kerangka human service organization, pengambilan keputusan etik tidak dapat direduksi menjadi tanggung jawab individual pekerja sosial semata. Pekerja sosial beroperasi dalam sistem organisasi yang membentuk batas-batas kewenangan, prosedur kerja, dan alokasi sumber daya. Gray dan Webb (2010) menegaskan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab etis untuk menyediakan struktur dan budaya kerja yang memungkinkan praktik refleksi etik secara kolektif. Mekanisme seperti supervisi etik, konsultasi profesional, dan diskusi tim lintas disiplin berperan penting sebagai ruang deliberasi etik, di mana dilema praktik dapat dibahas secara terbuka tanpa menempatkan beban moral secara eksklusif pada individu pekerja sosial.

Penguatan kapasitas etika organisasi dengan demikian menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan dilema etik yang berkelanjutan. Organisasi pelayanan disabilitas perlu mengintegrasikan pertimbangan etika ke dalam kebijakan internal, sistem pengambilan keputusan, serta indikator kinerja layanan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi integritas profesional pekerja sosial, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya praktik pelayanan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, strategi pengambilan keputusan etik dalam HSO harus dipahami sebagai proses institusional yang kolektif, bukan semata-mata keterampilan personal pekerja sosial.

**Dilema Etik sebagai Persoalan Struktural dalam Human Service Organization**

Dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial di pelayanan disabilitas tidak dapat dilepaskan dari karakteristik organisasi sebagai Human Service Organization (HSO). HSO beroperasi dalam kerangka kebijakan publik, sistem pendanaan, serta tuntutan akuntabilitas administratif yang sering kali membatasi fleksibilitas praktik profesional. Dalam konteks ini, dilema etik yang dihadapi pekerja sosial tidak semata-mata merupakan persoalan pilihan moral individual, melainkan refleksi dari persoalan struktural yang melekat pada sistem pelayanan kesejahteraan sosial (Hasenfeld, 2010; Lipsky, 2010).

Keterbatasan sumber daya organisasi, seperti keterbatasan anggaran, rasio pekerja sosial terhadap klien yang tidak seimbang, serta tekanan pencapaian target kinerja berbasis output, membentuk kondisi yang dapat disebut sebagai structural ethical dilemma. Pekerja sosial berada pada posisi sebagai street-level bureaucrats yang harus menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik konkret, sering kali dengan sumber daya yang tidak memadai. Kondisi ini memaksa pekerja sosial untuk melakukan prioritisasi layanan yang berimplikasi langsung pada pemenuhan hak klien disabilitas (Lipsky, 2010).

Dalam perspektif etika pekerjaan sosial, situasi tersebut menimbulkan ketegangan antara nilai keadilan sosial dan realitas organisasi yang berorientasi pada efisiensi. Banks (2021) menegaskan bahwa dilema etik dalam HSO kerap muncul ketika nilai-nilai profesi berhadapan dengan logika manajerial organisasi. Sementara itu, Houston (2015) menekankan bahwa etika pekerjaan sosial perlu dipahami dalam konteks relasi kuasa dan struktur institusional yang membingkai praktik, sehingga tanggung jawab etis tidak hanya dibebankan pada individu pekerja sosial, tetapi juga pada sistem organisasi.

Dengan demikian, dilema etik dalam pelayanan disabilitas perlu dipahami sebagai fenomena sistemik. Organisasi pelayanan memiliki peran penting dalam membentuk iklim etis (ethical climate) yang memungkinkan pekerja sosial menjalankan praktik profesional secara berkeadilan. Ketika struktur organisasi tidak mendukung nilai-nilai profesi, pekerja sosial berisiko terjebak dalam praktik kompromistis yang berpotensi menggerus integritas etika pekerjaan sosial (Gray & Webb, 2010; Morley et al., 2019).

Penting untuk ditegaskan bahwa dilema etik yang dihadapi pekerja sosial dalam pelayanan disabilitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan moral atau keterbatasan kapasitas individu. Dilema tersebut merupakan manifestasi dari persoalan struktural dan kebijakan organisasi pelayanan sosial yang membatasi ruang pengambilan keputusan profesional. Dalam konteks Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai human service organization, pekerja sosial beroperasi dalam kerangka regulasi, target kinerja, serta distribusi sumber daya yang telah ditetapkan secara institusional. Oleh karena itu, pilihan-pilihan etis yang diambil pekerja sosial seringkali bersifat terbatas (bounded ethical choices), di mana tindakan yang paling sesuai dengan nilai profesi tidak selalu dapat diwujudkan secara penuh. Pemahaman ini menegaskan bahwa dilema etik dalam pelayanan disabilitas harus diposisikan sebagai persoalan sistemik yang menuntut tanggung jawab organisasi dan kebijakan, bukan semata-mata tanggung jawab individual pekerja sosial.

**Implikasi Dilema Etik terhadap Profesionalitas dan Keberlanjutan Praktik Pekerja Sosial**

Dilema etik yang muncul secara berulang dalam konteks keterbatasan sumber daya organisasi memiliki implikasi signifikan terhadap profesionalitas pekerja sosial. Ketika pekerja sosial secara konsisten dihadapkan pada situasi di mana tindakan yang secara etis dianggap tepat tidak dapat dilakukan akibat hambatan struktural, kondisi tersebut berpotensi memunculkan tekanan moral (moral distress). Moral distress terjadi ketika pekerja sosial mengetahui tindakan yang sesuai dengan nilai profesi, namun tidak memiliki kewenangan, dukungan kebijakan, atau sumber daya untuk melaksanakannya (Reamer, 2019; Austin et al., 2016).

Tekanan moral yang berlangsung secara terus-menerus dapat berdampak pada kelelahan emosional, penurunan kepuasan kerja, serta melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai profesi. Studi menunjukkan bahwa pekerja sosial yang bekerja dalam lingkungan organisasi dengan dilema etik struktural yang tinggi cenderung mengalami risiko burnout dan ethical disengagement (Kim & Stoner, 2008; Lloyd et al., 2016). Dalam konteks pelayanan disabilitas, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas relasi profesional antara pekerja sosial dan klien, serta mengurangi sensitivitas terhadap kebutuhan spesifik klien disabilitas.

Lebih jauh, dilema etik struktural juga berdampak pada keberlanjutan praktik pekerjaan sosial secara profesional. Normalisasi praktik kompromistis akibat tekanan organisasi dapat mengaburkan batas antara praktik yang "dapat diterima secara administratif" dan praktik yang "bertanggung jawab secara etis". Morley et al. (2019) menegaskan bahwa tanpa dukungan organisasi yang memadai, pekerja sosial berisiko mengalami erosi integritas profesi, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme dukungan etik di tingkat organisasi menjadi kebutuhan mendesak. Supervisi reflektif, ruang diskusi etik, serta pengembangan kebijakan organisasi yang sensitif terhadap nilai-nilai pekerjaan sosial merupakan elemen penting dalam menjaga profesionalitas dan keberlanjutan praktik pekerja sosial di pelayanan disabilitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa etika pekerjaan sosial bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga komitmen kolektif organisasi pelayanan kesejahteraan sosial (Banks, 2021; Houston, 2015).

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan praktik etis dalam pelayanan disabilitas tidak dapat hanya dibebankan pada kapasitas reflektif pekerja sosial secara individual. Organisasi pelayanan sosial perlu mengembangkan mekanisme kelembagaan yang mendukung pengambilan keputusan etis, seperti supervisi etik, forum diskusi kasus, serta kebijakan internal yang sensitif terhadap kebutuhan jangka panjang penyandang disabilitas. Bagi pekerja sosial, pemahaman terhadap dilema etik sebagai persoalan struktural memperkuat peran advokatif dalam mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola organisasi yang lebih adil. Dengan demikian, praktik pekerjaan sosial yang etis tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga melalui upaya kolektif untuk menciptakan sistem pelayanan yang memungkinkan nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disintesis bahwa dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Disabilitas merupakan fenomena kompleks yang terbentuk dari interaksi antara nilai profesi, kebutuhan klien, dan struktur organisasi pelayanan. Keterbatasan sumber daya, kebijakan internal, serta tuntutan kinerja organisasi tidak hanya membatasi pilihan tindakan pekerja sosial, tetapi juga membentuk konteks etis tempat keputusan profesional diambil. Dalam kondisi ini, dilema etik, tekanan moral (moral distress), dan

ketegangan nilai tidak dapat dipahami sebagai kegagalan individu pekerja sosial, melainkan sebagai konsekuensi dari desain sistem pelayanan dan tata kelola organisasi sebagai human service organization. Oleh karena itu, praktik etika pekerjaan sosial dalam pelayanan disabilitas menuntut pendekatan yang melampaui kepatuhan individual terhadap kode etik, dengan menempatkan tanggung jawab etis secara kolektif pada organisasi dan kebijakan pelayanan. Sintesis ini menegaskan bahwa penguatan praktik etis hanya dapat dicapai melalui integrasi refleksi etik, dukungan institusional, dan perubahan struktural yang memungkinkan nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas diwujudkan secara nyata dalam praktik pelayanan.

## Simpulan

Praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan disabilitas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) menunjukkan bahwa dilema etik merupakan realitas yang melekat dalam konteks organisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Keterbatasan sumber daya organisasi, baik dalam bentuk anggaran, tenaga profesional, maupun dukungan kebijakan, menciptakan ketegangan antara tuntutan pemenuhan kebutuhan klien disabilitas dan kewajiban organisasi untuk mengelola layanan secara efisien dan berkelanjutan. Ketegangan tersebut menempatkan pekerja sosial pada situasi konflik nilai yang kompleks dan berimplikasi langsung pada pengambilan keputusan profesional.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa dilema etik dalam pelayanan disabilitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral individual pekerja sosial, melainkan sebagai persoalan etika struktural dalam Human Service Organization (HSO). Pekerja sosial sering kali harus mengambil keputusan dalam kerangka bounded ethical decision-making, di mana pilihan etis dibatasi oleh kebijakan dan kapasitas organisasi. Kondisi ini berpotensi memunculkan tekanan moral (moral distress) yang, apabila tidak dikelola secara memadai, dapat berdampak pada integritas profesional dan kualitas pelayanan.

Dengan mengintegrasikan nilai dan kode etik International Federation of Social Workers (IFSW) dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), artikel ini menegaskan bahwa etika pekerjaan sosial berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka reflektif dan kritis dalam menghadapi dilema

praktik. Kode etik memberikan landasan bagi pekerja sosial untuk menjaga orientasi pada keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat klien, serta tanggung jawab profesional, sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi advokasi etis di tingkat organisasi.

Kontribusi akademik artikel ini terletak pada penguatan perspektif etika pekerjaan sosial dalam konteks pelayanan disabilitas di Indonesia, khususnya pada level organisasi layanan. Artikel ini memperkaya diskursus etika pekerjaan sosial dengan menempatkan dilema etik sebagai fenomena kontekstual dan struktural, bukan sekadar persoalan kepatuhan individu terhadap norma profesi.

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan disabilitas memerlukan penguatan kapasitas refleksi etik pada tingkat individu maupun organisasi. Pekerja sosial diharapkan mampu mengembangkan kepekaan etis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya organisasi dengan menjadikan nilai-nilai profesi dan kode etik sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Refleksi etik yang berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan profesional tetap berorientasi pada kepentingan terbaik klien disabilitas serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Pada tingkat organisasi pelayanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) disabilitas perlu mengembangkan lingkungan praktik yang mendukung pengambilan keputusan etis secara kolektif. Penyediaan supervisi etik, forum diskusi profesional, serta mekanisme konsultasi internal menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan moral yang dialami pekerja sosial. Dengan demikian, tanggung jawab etis tidak semata-mata dibebankan pada individu pekerja sosial, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab institusional sebagai Human Service Organization (HSO). Selain itu, penguatan kebijakan sosial yang mendukung pelayanan disabilitas secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempertimbangkan implikasi etis dari keterbatasan sumber daya dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial. Peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia profesional, serta perbaikan sistem layanan diharapkan mampu meminimalkan munculnya dilema etik struktural dalam praktik pekerjaan sosial.

Dalam konteks pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya perlu mengkaji dilema etik dalam pelayanan disabilitas melalui pendekatan empiris dan kontekstual. Eksplorasi pengalaman pekerja sosial dalam menghadapi dilema etik dan tekanan moral akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori etika pekerjaan sosial yang lebih responsif terhadap realitas praktik di Indonesia. Kajian lanjutan semacam ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara teori, kode etik, dan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

## Daftar Pustaka


Austin, W., Lemermeyer, G., Goldberg, L., Bergum, V., & Johnson, M. S. (2016). Moral distress in healthcare practice: The situation of social workers. Social Work in Health Care, 46(3), 167–182.

Banks, S. (2021). Ethics and values in social work (5th ed.). Red Globe Press.

Banks, S., & Gallagher, A. (2009). Ethics in professional life: Virtues for health and social care. Palgrave Macmillan.

Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 10(6), 807–815.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Gray, M., & Webb, S. A. (2010). Ethics and value perspectives in social work. Palgrave Macmillan.

Hasenfeld, Y. (2010). Human services as complex organizations (2nd ed.). SAGE Publications.

Houston, S. (2015). Reflective practice: A model for supervision and practice. Learning Matters.

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. (2019). Kode etik pekerja sosial profesional Indonesia. IPSPI.

International Federation of Social Workers. (2018). Global social work statement of ethical principles. https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

Kim, H., & Stoner, M. (2008). Burnout and turnover intention among social workers: Effects of role stress, job autonomy and social support. Administration in Social Work, 32(3), 5–25. https://doi.org/10.1080/03643100801922357

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Kementerian Sosial RI.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.

Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2016). Social work, stress and burnout: A review. Journal of Mental Health, 11(3), 255–265. https://doi.org/10.1080/09638230020023642

Morley, C., Ablett, P., & Macfarlane, S. (2019). Engaging with social work: A critical introduction. Cambridge University Press.

Reamer, F. G. (2019). Ethical standards in social work: A review of the NASW Code of Ethics (3rd ed.). NASW Press.

United Nations. (2016). Convention on the rights of persons with disabilities. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html